

MASUK ISLAM KARENA ALASAN PERKAWINAN

**(Studi Kasus Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa
Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Atabik Hasin
112111017

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Atabik Hasin
NIM : 112111017
Jurusan/Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul :

MASUK ISLAM KARENA ALASAN PERKAWINAN (STUDI KASUS PERKAWINAN PASANGAN YANG SEMULA BEDA AGAMA DI DESA BORANGAN KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN).

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

17 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Ketua Sidang,

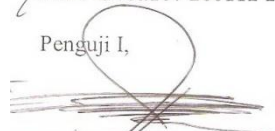
Semarang, 17 Desember 2015
Sekertaris Sidang,



Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002


Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

Penguji I,

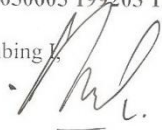
Penguji II,



Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1 001


Muhammad Shoim, S.H., M.H
NIP. 19711101 200604 1 003

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. A. Ghozali, M.S.I
NIP. 19530524 199303 1 001


Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag
NIP. 19730730 200312 1 003



1. Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I

NIP. 19530524 199303 1 001

Jl. Suburan Barat No. 171 Rt. 05/02 Mranggen Demak

2. Dr. H. Ali Imron, M. Ag

NIP. 19730730 200312 1 003

Jl. Kyai Gilang Kauman No. 12 Rt. 02/IV Mangkang Kulon Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah skripsi

a.n Sdr. Atabik Hasin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Atabik Hasin

NIM : 112111017

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiiyyah

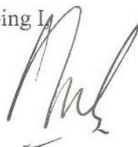
Judul : Faktor-Faktor Penundukan Hukum Dalam Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama (Studi Kasus di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten).

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 November 2015

Pembimbing II,

Pembimbing I




Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I
NIP. 19530524 199303 1 001

Dr. H. Ali Imron, M. Ag
NIP. 19730730 200312 1 003

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga, tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 November 2015

Deklarator,



Atabik Hasin

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.

ABSTRAK

Perkawinan beda agama di Indonesia hingga saat ini masih menyisakan masalah baik dalam tataran normatif maupun dalam implementatif. Dalam tataran normatif, aturan perkawinan beda agama yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan masih ambigu. Menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, yaitu: (1) Meminta penetapan Pengadilan, (2) Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama, (3) Mengikuti salah satu agama pasangannya, (4) Menikah di luar negeri. Perkawinan beda agama dalam kasus kali ini adalah perkawinan pasangan yang semula beda agama dengan cara masuk Islam karena dasar perkawinan yaitu dengan berpindah agama sementara ke agama dari salah satu pasangan yang akan melakukan perkawinan.

Dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah: (1) Bagaimana praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten? (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masuk Islam karena alasan perkawinan dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama di desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten?

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, dan wawancara.

Hasil penelitian: (1) Praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten ini masih ada hingga saat ini, terjadinya praktik perkawinan ini karena kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai hukum perkawinan pasangan yang semula beda agama. Di dalam lingkungan masyarakat Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, perkawinan seperti ini sudah menjadi hal biasa, mereka melakukan

dengan cara masuk Islam atau menundukkan hukum dengan berpindah agama kepada salah satu agama calon pasangannya. Praktik perkawinan seperti ini menurut Islam adalah *fasakh* karena murtad (setelah masuk Islam kemudian kembali lagi ke agamanya semula (non muslim) halal darahnya untuk dibunuh). (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi masuk Islam dengan dasar perkawinan dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten adalah: (A) Ketaatan terhadap orang tua. (B) Kemudahan administrasi perkawinan. (C) Ketidaktahuan ajaran agama.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya deklarasikan kepada orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberi makna pada setiap jengkal langkahku dalam berproses menjadi manusia yang selalu ingin terus belajar. Kupersembahkan bagi mereka yang selalu setia berada di ruang waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kepada *Illahi Robbi* yang telah menuntun penulis menjadi manusia yang lebih baik dan *Rasulullah saw* yang penulis nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir.
2. Kepada Ibu dan Abahku tercinta (Ibu Faizun dan Abah Ghozali) yang selalu membimbing dan mengarahkan hidupku, serta tak pernah lelah mendo'akanku kapanpun dan dimanapun, sehingga diberi kemudahan di setiap jalanku.
3. Saudaraku tercinta (Mas Usman, Mbak Seha, Mas Faiq, Mbak Diani, Mas Sabiq, Mbak Sirly, Mas Aim, Mbak Milla) yang selalu memberi motivasiku dalam segala hal.
4. Keponakanku tercinta (Nail, Nauval, Fakhry, Shaquila, Najmy, Zahira, Zahran) yang selalu membuatku tersenyum dengan celotehannya.
5. Teman-teman Ahwal Al-Syakhsiyyah (A) 2011 yang telah menemaniku suka-duka di kampus dalam menuntut ilmu.
6. Teman-teman HMJ AS yang mengajarkanku bagaimana berorganisasi yang baik.
7. Teman-teman KKN ke 64 Posko 06 yang mengajarkanku tentang kehidupan bermasyarakat.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada *Illahi Robbi* yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sehingga kita masih diberi kesehatan dalam menjalankan perintah-Nya. Shalawat serta Salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw yang kita nanti-nanti kan syafaa'atnya di *yaumul qiyamah*. Amiin...

Syukur kehadiran Allah SWT yang tiada henti-hentinya, hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam rangka melengkapi syarat untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Syaria'ah UIN Walisongo Semarang. Banyak proses yang dilewati, banyak pula pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan. Oleh karena itu, penulis merasa berhutang budi atas bantuan, bimbingan dan saran serta hal-hal lainnya dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih.

1. Bapak Drs. H. Ahmad Ghozali, M.S.I., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ali Imron, M. Ag., selaku Pembimbing II, terima kasih karena telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang sekaligus sebagai wali studi penulis.
3. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

4. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing penulis menjadi manusia yang lebih baik dan telah mengenalkan penulis tentang beraneka ragam disiplin ilmu.
6. Bapak M. Ashonany, S. Ag., selaku Kepala KUA Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten beserta jajaran Staf, terima kasih karena telah menerima penulis untuk penelitian guna melengkapi data-data dalam skripsi ini.
7. Bapak Pitoyo selaku Kepala Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten beserta jajaran Staf, terima kasih telah memberikan informasi kepada penulis guna melengkapi data-data dalam skripsi ini.
8. Ustadz Siswoyo, S.Pd selaku tokoh agama Islam Desa Borangan yang telah menerima penulis dan memberikan informasi terkait skripsi ini.
9. Bapak Iswanto selaku Ketua RW dan Masyarakat Desa Borangan yang bersedia penulis wawancara guna melengkapi data-data dalam skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal sholih dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis menyadari atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABTRAKS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Telaah Pustaka	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PENUNDUKAN HUKUM

A. Perkawinan Menurut Islam	27
1. Pengertian Perkawinan Menurut Islam	27
2. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Islam	30

3. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Islam.....	36
4. Perkawinan Beda Agama Menurut Islam	39
B. Penundukan Hukum	44
1. Penundukan Hukum	44
2. Penundukan Hukum Dalam Perkawinan	48
3. Praktik Perkawinan Pasangan Beda Agama di Indonesia ..	54
 BAB III: FAKTOR-FAKTOR MASUK ISLAM KARENA	
ALASAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN	
PASANGAN YANG SEMULA BEDA AGAMA DI	
DESA BORANGAN KECAMATAN	
MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN	
A. Gambaran umum masyarakat Desa Borangan Kecamatan	
Manisrenggo Kabupaten Klaten	57
1. Letak Geografis Desa Borangan	57
2. Luas Wilayah Desa Borangan	58
3. Jumlah Penduduk Desa Borangan	62
4. Bangunan Desa dan Sarana Umum	64
5. Kondisi Sosial	65
B. Praktik Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa	
Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten	67
C. Faktor-Faktor Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan Dalam	
Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa Borangan	
Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.....	75

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR MASUK
ISLAM KARENA ALASAN PERKAWINAN DALAM
PERKAWINAN PASANGAN YANG SEMULA BEDA
AGAMA DI DESA BORANGAN KECAMATAN
MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN**

A. Analisis Terhadap Praktik Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.....	94
B. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan Dalam Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten	106

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran-saran	128
C. Penutup	129
D. Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan, maka keberlangsungan pergaulan laki-laki dan perempuan dapat terjaga hingga kini. Keberlangsungan hidup yang dapat menjamin terjaganya garis keturunan manusia. Anak keturunan dari hasil perkawinan dapat menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara terhormat.¹

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, agama Islam memberikan ketentuan dalam syari'atnya yaitu berupa pernikahan/perkawinan yang sah. Perkawinan dalam pandangan hukum Islam merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 1.

melaksanakannya merupakan ibadah.² Dengan perkawinan yang sah, maka garis keturunan manusia akan terjamin keabsahannya.

Perkawinan diatur oleh suatu peraturan yang datang dari suatu agama atau aturan buatan manusia seperti hukum adat. Misalnya perkawinan di Indonesia, tata aturannya telah ditetapkan melalui hukum agama yang berkembang di negara Indonesia.³ Dari agama Hindu-Budha, Kristen sampai agama Islam telah mempengaruhi adanya aturan-aturan yang harus di taati oleh orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan. Aturan-aturan mengenai syarat-syarat dalam perkawinan, misalnya kriteria calon pasangan pengantin, tata cara atau rukun perkawinan mengambil dari aturan-aturan agama. Di dalam agama Islam dijelaskan tentang rukun-rukun perkawinan, yaitu adanya calon pasangan pengantin laki-laki dan perempuan, adanya wali, saksi, dan akad perkawinan.⁴

² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat, 1999, hlm. 14.

³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1984, cet. VIII, hlm. 20.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, cet. I, hlm. 55-56.

Dalam hadits telah dijelaskan tentang memilih calon pasangan, dan pilihan yang terbaik hadits dari Abu Hurairah r.a.,:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (متفق عليه)⁵

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang kuat agamanya, engkau akan berbahagia. (HR. Al-Bukhori dan Muslim)*

Di Indonesia, aturan-aturan tentang perkawinan telah termaktub dalam sebuah Undang-Undang atau Peraturan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) merupakan unifikasi hukum perkawinan sebelumnya, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*),

⁵ Imam Ash-Shon’ani, *Subulus Salam*, juz III, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, hlm. 111.

Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, dan Peraturan Perkawinan Campuran.⁶

Ada beberapa hal yang menarik dari hasil unifikasi aturan-aturan perkawinan di atas. Salah satu hal dalam pembahasan perkawinan yang menarik untuk dikaji adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama, karena pernikahan beda agama sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Sebelum tahun 1974 perkawinan beda agama diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran. Kemudian setelah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diberlakukan sejak 1 Oktober 1975 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dikeluarkan tanggal 1 April 1975, maka perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas tentang perkawinan beda agama, sehingga ada dualisme penafsiran atau pemahaman berkaitan dengan sah atau

⁶ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006, hlm. 6.

tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.⁷ Aturan ini menyerahkan sah dan tidaknya hukum perkawinan pada masing-masing agama.

Dalam agama Islam, ulama berselisih pendapat mengenai sah dan tidaknya pernikahan beda agama. Pertama, ulama yang mengharamkan pernikahan beda agama, dasarnya adalah QS. Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ه وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ...

Artinya: *Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki)*

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yogyakarta: New Merah Putih, 2012, hlm. 6.

*musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.*⁸

QS. Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

...لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

Artinya: *Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.*⁹

Kedua, Ulama yang membolehkan perkawinan beda agama dengan dasar QS. Al-Ma'idah ayat 5 yang berbunyi:

...وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

Artinya: *Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya.*¹⁰

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 35.

⁹ Departemen Agama RI, *ibid*, hlm. 550.

¹⁰ Departemen Agama RI, *ibid*, hlm. 107.

Aturan negara tentang perkawinan pasangan beda agama yang terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyerahkan sepenuhnya pada masing-masing agama menjelaskan bahwa, secara formil pernikahan beda agama dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pencatat Perkawinan selama unsur-unsur materiilnya terpenuhi (termasuk aturan agamanya).

Meski secara yuridis perkawinan beda agama tidak tertutup rapat untuk dilaksanakan, tetapi dalam dataran empiris, perkawinan beda agama sulit untuk dilakukan. Kesulitan dilaksanakannya perkawinan beda agama semakin terlihat sejak lahirnya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 tentang keharaman nikah beda agama dan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, yang memutuskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram atau tidak sah,¹¹ maka pernikahan beda agama sudah tertutup untuk

¹¹ *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 481.

dilaksanakan atau perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah.

Disisi lain, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama masih terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang. Untuk melegalkan perkawinan dari pasangan berbeda agama ini, biasanya para pelakunya masuk Islam karena alasan perkawinan (penundukan hukum). Setidaknya ada empat cara menundukkan hukum, yaitu meminta penetapan pengadilan, mengikuti salah satu agama pasangannya, sama-sama melakukan sesuai agamanya, dan menikah di luar negeri.¹²

Penundukan hukum yang biasa dilakukan oleh pasangan beda agama misalnya, pasangan beda agama melakukan perkawinan di luar negara Indonesia, kemudian mereka mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk mendapatkan legalisasinya. Bentuk perkawinan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai harta banyak.

¹² http://www.kompasiana.com/tikasinaga/menyiasati-hukum-dalam-perkawinan-beda-agama_55287dab6ea834b4638b4582 diakses pada tanggal 02 April 2015 pada pukul 10.00 WIB.

Bentuk lain dari penundukan hukum yang dilakukan pasangan beda agama adalah dengan cara masuk Islam karena alasan perkawinan atau menundukkan agama dari salah satu pasangan yang akan melakukan perkawinan. Misalnya, seorang laki-laki yang beragama Islam akan menikah dengan seorang perempuan yang beragama Hindu, salah satu dari mereka mengganti agamanya yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan calon pasangannya, kemudian melakukan perkawinan sesuai dengan agama yang dikehendaknya, apakah di Kantor Catatan Sipil atau di Kantor Urusan Agama. Setelah berlangsung akad perkawinan, maka kedua pasangan tersebut kembali kepada agamanya masing-masing. Praktik perkawinan seperti ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak terlalu banyak mempunyai harta.

Meskipun perkawinan beda agama sulit dilakukan di Indonesia, namun pasangan yang berbeda agama dapat melangsungkan perkawinan dengan cara penundukan hukum seperti di atas. Fakta yang terjadi di masyarakat Indonesia,

perkawinan seperti ini terus terjadi hingga sekarang. Selain fakta tersebut, ada hal yang juga menarik dari praktik perkawinan ini, yaitu adanya suatu desa di Indonesia, yang sudah memaklumi adanya perkawinan beda agama dengan melakukan penundukan hukum melalui penggantian sementara agamanya dalam Kartu Tanda Penduduk. Praktik perkawinan ini berlangsung secara turun temurun hingga saat ini. Baik dari pasangan yang semula beragama Islam dengan Hindu, Hindu dengan Kristen atau Islam dengan Kristen.

Berlangsungnya praktik perkawinan pasangan (yang semula) beda agama ini terjadi di desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. Bentuk perkawinan seperti ini sudah terjadi dari masa dahulu sampai masa sekarang. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Borangan, bahwa seluruh agama yang diakui oleh negara diakui hak-haknya, termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan dan hak untuk beragama. Secara administratif, perkawinan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya pasangan yang menikah di Kantor Urusan

Agama (KUA) harus beragama Islam, namun secara hak beragama seseorang boleh memeluk agama yang diyakininya.¹³

Seperti keluarga bapak Suparman dan ibu Ngaisah yang melakukan perkawinan pasangan yang semula beda agama. Bapak Suparman beragama Hindu, sedangkan ibu Ngaisah beragama Islam. Mereka menikah pada tahun 2003, dengan mengikuti agama istrinya karena tata cara perkawinan Islam itu mudah. Namun setelah menikah, bapak Suparman kembali lagi ke agamanya semula yaitu Hindu, dan bahkan ibu Ngaisah juga merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya menjadi Hindu, akan tetapi Akta Nikah nya tetap Islam dari KUA.

Kasus penundukan hukum dengan cara menundukkan agama oleh para pelaku perkawinan (yang semula) berbeda agama yang dilakukan oleh warga Desa Borangan menarik untuk dikaji. Tentu menjadi menarik ketika penulis dapat mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik perkawinan ini. Dari sini penulis tertarik untuk meneliti

¹³ Wawancara dengan Kepala Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten di Kantor Balai Desa pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 pukul 15.00 WIB.

“Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama Di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang dibahas dan diteliti dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masuk Islam karena alasan perkawinan dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama di desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masuk Islam karena alasan perkawinan dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama di desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan, terutama pengetahuan tentang keadaan yang riil terhadap praktik perkawinan pasangan beda agama.

2. Memberikan gambaran yang jelas terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi masuk Islam karena alasan perkawinan dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka, penulis tidak menemukan tulisan yang sama dengan tema yang penulis kaji, meski ada beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap buku-buku dan karya tulis serta penelitian sebelumnya, pembahasan yang banyak menyangkut bagaimana hukum perkawinan beda agama. Sementara penundukan hukum masih sedikit, bahkan faktor-faktor masuk Islam karena alasan perkawinan dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama yang terjadi di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten belum ditemukan.

Berikut ini beberapa kajian yang penulis masukkan dalam telaah pustaka sebagai pembandingan antara tema yang penulis kaji dengan tema-tema yang telah ada.

1. Rosyidah Widyaningrum, Mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan skripsinya yang berjudul "Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang". Skripsi ini membahas mengenai status hukum pernikahan dari keluarga beda agama dan keharmonisan keluarga beda agama yang terjadi di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.¹⁴ Dalam tulisan Rosyidah diuraikan bagaimana fenomena kehidupan yang dijalani oleh pasangan yang berbeda agama dalam satu tempat tinggal.
2. M. Syukron Mansyur, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skripsinya yang berjudul "Suami Beda Agama dan Pengaruhnya Terhadap Relasi dalam

¹⁴ Rosyidah Widyaningrum, 042111103, *Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.

Keluarga Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten)”. Skripsi ini membahas mengenai kehidupan pasangan beda agama dan pandangan hukum Islam terhadap relasi dalam keluarga pasangan beda agama.¹⁵ Tulisan ini hampir sama dengan tulisan Rosyidah berkaitan dengan fenomena kehidupan pasangan yang berbeda agama yang tinggal dalam satu tempat tinggal dalam kesehariannya. Tulisan ini juga memaparkan tentang bagaimana peran kepala rumah tangga terhadap anggota keluarga yang berbeda agamanya, relasi keluarga dan sosial.

3. Ulfatun Nikmah, Mahasiswi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skripsinya yang berjudul “Keluarga Harmonis Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana kondisi keharmonisan pasangan beda agama dalam tinjauan

¹⁵ M. Syukron Mansyur, 05350028, Suami Beda Agama dan Pengaruhnya Terhadap Relasi Dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

hukum Islam di dusun Muneg Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁶

Tulisan-tulisan di atas terdapat perbedaan dan persamaan dengan tema yang penulis kaji. Persamaannya adalah sama-sama melihat kehidupan pasangan yang berbeda agama. Sedangkan perbedaannya adalah dalam tulisan-tulisan di atas menjelaskan bagaimana kehidupan keseharian antara pasangan beda agama yang tinggal dalam satu rumah, sementara tema yang penulis kaji adalah faktor-faktor masuk Islam karena alasan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang semula berbeda agama di desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

Sementara tulisan-tulisan yang banyak penulis temukan adalah bagaimana hukum perkawinan beda agama, baik dilihat dari hukum Islam atau hukum positif. Tulisan-tulisan berikut menjelaskan status boleh dan tidaknya hukum perkawinan beda agama, misalnya tulisan Ahmad Yani “*Tidak Sah Nikah Beda*

¹⁶ Ulfatin Nikmah, 05350057, *Keluarga Harmonis Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Agama”¹⁷ tulisan Asnawi Ihsan “*Membedah Hukum Beda Agama Perspektif Ushul Fikih dan Hukum Yang Berlaku di Indonesia*”¹⁸

Khairil Anwar menulis “*Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Perkawinan Wanita Hamil*”.¹⁹

Selain itu, terdapat beberapa tulisan yang memaparkan bagaimana penundukan hukum atau cara-cara yang dilakukan oleh pasangan yang (semula) berbeda agama untuk melakukan perkawinan yang sah secara hukum. Tulisan-tulisan tersebut di antaranya: tulisan dalam hukum online menguraikan “*Empat cara penyelundupan hukum bagi Pasangan Beda Agama*”²⁰ dalam

¹⁷ <http://www.voa-islam.com/news/undercover/2013/03/12/23564/ustadz-ahmad-yani-tidak-sah-menikah-beda-agama>. diakses pada tanggal 02 April 2015 pada pukul 10.00 WIB

¹⁸ <http://asnawiihsan.blogspot.com/2009/05/perkawinan-beda-agama.html>. diakses pada tanggal 02 April 2015 pada pukul 10.00 WIB

¹⁹ <http://kuaprasi.blogspot.com/2011/10/makalah-khairil-anwar-perkawinan-beda.html> diakses pada tanggal 02 April 2015 pada pukul 10.00 WIB.

²⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama> diakses pada tanggal 02 April 2015 pada pukul 10.00 WIB.

kompasiana dipaparkan “*Menyiasati Hukum dalam Perkawinan Beda Agama*”.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang tepat untuk melakukan kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.²² Metode penelitian dalam tulisan skripsi ini ada 4, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²³ Penelitian lapangan ini dilakukan di Desa

²¹ http://www.kompasiana.com/tikasinaga/menyiasati-hukum-dalam-perkawinan-beda-agama_55287dab6ea834b4638b4582 diakses pada tanggal 02 April 2015 pada pukul 10.00 WIB.

²² Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, cet. X, hlm. 1.

²³ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *ibid*, hlm. 46.

Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten karena untuk menggali faktor-faktor masuk Islam karena dasar perkawinan dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama. Penulis juga melakukan observasi data guna melengkapi data yang akan diperlukan. Penulisan skripsi ini juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.²⁴

2. Sumber Data

Pada bagian ini disajikan pengelompokan sumber data disesuaikan dengan karakteristiknya, dibedakan menjadi dua macam yaitu:

²⁴ Bagong Suyanto & Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, cet. VII, hlm. 166.

- a. Data primer, adalah data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti.²⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara penulis dengan tokoh agama Islam Desa Borangan (Ustadz Siswoyo), keluarga bapak Suparman, keluarga bapak Maryono, keluarga bapak Suroto, keluarga bapak samadi, keluarga bapak Wiranto, keluarga bapak Sumarno yang termasuk masyarakat desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten yang melakukan masuk Islam karena dasar perkawinan dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama, serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi KUA Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.²⁶ Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku-

²⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, cet. I, hlm. 42.

²⁶ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *op. cit*, hlm. 43.

buku, atau tulisan yang berhubungan dengan perkawinan pasangan yang semula beda agama dan sumber data lain yang diperlukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah:

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.²⁷ Metode observasi ini penulis gunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung data-data yang ada di KUA Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten mengenai perkawinan pasangan beda agama.

b. Interview

Interview adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang

²⁷ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *ibid*, hlm. 51.

atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁸

Metode ini digunakan penulis untuk mewancarai masyarakat yang melakukan perkawinan pasangan beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang faktor-faktor masuk Islam karena dasar perkawinan dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang diperoleh terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Metode analisis data ini menggunakan *deskriptif analitik*, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan fokus. Dengan cara menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. Penulis menggunakan metode ini karena

²⁸ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *ibid*, hlm. 83.

data yang digunakan bukan merupakan dalam bentuk angka, melainkan laporan-laporan penelitian.

Pendekatan yang dipakai dalam menganalisis data ini ada dua: *Pertama*, pendekatan *yuridis* adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang di gunakan sebagai rujukan adalah KHI dan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. *Kedua*, pendekatan *normatif* adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, hukum-hukum fiqh di antaranya kaidah *ushuliyyah*, kaidah *fiqhiyyah* dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan.

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang berisi mengenai gambaran umum yang mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi ini,

mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi skripsi ini.

Bab kedua, yaitu mendeskripsikan tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi: pengertian perkawinan menurut Islam, dasar hukum perkawinan menurut Islam, syarat dan rukun perkawinan menurut Islam, perkawinan beda agama dan penundukan hukum yang meliputi: praktik perkawinan pasangan beda agama di Indonesia.

Bab ketiga, mengurai data-data tentang masuk Islam karena alasan perkawinan dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama di desa Borangan, yang meliputi: gambaran umum masyarakat desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi masuk Islam karena alasan perkawinan dalam perkawinan

pasangan yang semula beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

Bab keempat yaitu analisis terhadap faktor-faktor masuk Islam karena alasan perkawinan dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama yang meliputi: analisis praktik masuk Islam karena alasan perkawinan dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, analisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi masuk Islam karena alasan perkawinan dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama di desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

Bab lima berisi penutup, yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PENUNDUKAN HUKUM

A. Perkawinan Menurut Islam

1. Pengertian Perkawinan Menurut Islam

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri.²⁹ Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata *nikah* (نكاح). Menurut bahasa *nikah* arti hakikatnya adalah akad (عقد) dan wathi/bersenggama (وطء) sebagai arti kiasan atau majaznya. Kemudian secara istilah (syara') *nikah* adalah suatu akad yang mengandung jaminan diperbolehkannya

²⁹ Kamus Umum Bahasa Indonesia, hlm. 453.

persetubuhan dengan (menggunakan) lafal (yang mustak dari) inkah, tazwij atau terjemahnya.³⁰

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:³¹

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ
إِنِّكَاحٍ أَوْ تَحْوِهِ

Artinya: *Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.*

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat:

عَقْدٌ يُفِيدُ حِلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنَهُمَا
وَيُحَدِّدُ مَا لَهُمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِمَا مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: *Akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga*

³⁰ Syekh Muhammad Khatib Syarbiny, *Mughnil Muhtaj*, Juz III, hlm. 123.

³¹ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab*, Juz II, hlm. 30.

(suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong di antara keduanya dan memberi batas hak dan kewajiban bagi mereka.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, yakni dengan melangsungkan perkawinan, masing-masing saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap ridha Allah SWT.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³² Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonsesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, cet. I, hlm. 142.

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³

2. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Islam

Berdasarkan dalil-dalil di syari'atkan suatu perkawinan, jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan pada dasarnya adalah mubah, sedang menurut ahli Dhohir adalah wajib. Mereka berselisih pendapat karena amar/perintah yang ada pada ayat;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

وَأِمَائِكُمْ^ج إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ق وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

³³ Wantjik Saleh, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1974, cet. II, hlm. 87.

Itu menurut jumhur adalah hanya mempunyai arti mubah/kebolehan (للإباحة), seperti pada ayat 60 QS. Al-Baqarah; *كلوا واشربوا من رزق الله* *Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah*, bukan menunjuk arti wajib sebab amar tersebut tidak mutlak melainkan di takhsis dengan ayat;

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
 الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ
 الْمُؤْمِنَاتِ... وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ...

Artinya: *Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahiperempuan merdeka yang beriman, (maka dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki... Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. (QS. An-Nisa': 25)*³⁴

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 82.

Sedangkan menurut ahli Dhohir, bahwa amar pada ayat tersebut menunjukkan arti wajib, karena sesuai kaidah; *الأصل في الأمر للوجوب* “*Pada dasarnya amar menunjukkan arti wajib*”. Tetapi pendapat ini bertolak belakang dengan ayat 25 QS. An-Nisa’ tersebut.³⁵ Dan ada pendapat nikah itu wajib, yakni wajib mengikuti batas maksimal isteri yang boleh di madu, yakni empat.³⁶

Karena nikah dihubungkan dengan lima macam tingkatan hukum dalam Islam yang disebut *Al-Ahkam Al-Khomsah*, yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh dan haram, maka hukum nikah dapat berubah dari hukum asalnya (semula) yakni mubah³⁷ menjadi yang lain, jika dikaitkan dengan kondisi dan niat orang yang akan melaksanakan pernikahan, yaitu:

a. Sunnah

³⁵ Muhammad Ali As-Shobuni, *Rawa’iul Bayan*, Juz I, hlm. 425.

³⁶ Syekh Muhammad Ali As-Sayis, *Tafsir Ayatil Qur’an*, Juz I, hlm. 24.

³⁷ Mubah yaitu hukum asal bagi seseorang untuk melakukan nikah. Bagi tiap orang yang sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi syarat perkawinan, maka mubah/boleh/halal melakukan nikah. (QS. Al-Baqarah: 60)

Seseorang yang telah mencapai kedewasaan jasmaniyah dan rohaniyah, sudah mempunyai bekal atau pencaharian untuk biaya hidup berkeluarga dan sangat berkehendak kepada nikah, tetapi tidak khawatir terjerumus kedalam perzinaan, disunnahkan kawin.

b. Wajib

Nikah itu hukumnya wajib, bagi orang yang telah mencapai kedewasaan jasmaniyah dan rohaniyah, sudah mempunyai penghasilan, dan sangat hajat kepada nikah, serta dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina bila tidak nikah.

c. Makruh

Nikah itu hukumnya makruh, bagi orang yang cacat; yakni tidak mampu mengumpuli atau tidak mampu memberi nafkah, tetapi tidak membawa madlorot terhadap isteri, seperti dia kaya namun kurang semangat dalam masalah biologis.

d. Haram

Nikah itu hukumnya haram, bagi orang yang tidak mampu dan tidak menepati nafkah batin atau lahir, sehingga membuat madlorot kepada isteri, atau bermaksud jahat, menghianati, menyakiti atau mempermainkan perempuan yang akan di nikahnya.³⁸

Demikian itu pendapat ulama-ulama mutaakhirin, khususnya dari Malikiyah, karena berdasarkan masalah mursalah, namun masih banyak pula ulama yang tidak menyetujuinya.³⁹

Dalam hadits telah dijelaskan tentang memilih calon pasangan, dan pilihan yang terbaik hadits dari Abu Hurairah r.a.,:

³⁸ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, juz I, hlm. 13.

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, hlm. 2.

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ. (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang kuat agamanya, engkau akan berbahagia. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).⁴⁰

Bahkan Rasulullah saw memberi rambu-rambu dalam memilih calon isteri dengan Sabdanya:

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُرْدِيهِنَّ، وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُعْطِيهِنَّ وَأَنْكِحُوا لِلدِّينِ، وَلِأَمَةٍ سَوْدَاءُ خَرَقَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ. (ابن ماجه والبخار والبيهقي عن عبد الله

عمرو)⁴¹

⁴⁰ Imam Ash-Shon'ani, *Subulus Salam*, juz III, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, hlm. 111.

⁴¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Syaukani, *Nailul Author*, Juz VI, Dar al-Fikr, hlm. 233.

Artinya: *Kalian jangan memperisteri wanita-wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu akan menjadikan rendah karena suatu saat hilang, dan jangan kalian memperistri wanita-wanita karena kekayaannya, karena kekayaannya itu boleh jadi membuat mereka sombong terhadapmu, tetapi nikahilah wanita-wanita yang punya (kuat) agama, budak perempuan yang bodoh tetapi punya (kuat) agama itu lebih baik.* (HR. Ibnu Majjah Al-Bazzar Al-Baihaqi Hadits Marfu' dari sahabat Abdullah Ibn 'Amr)

3. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Islam

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan

dijelaskan sebagai berikut. Rukun nikah dan syarat-syaratnya, yaitu:

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam.
2. Laki-laki.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat memberikan persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam.
2. Perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat dimintai persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya;

1. Laki-laki.
2. Dewasa.
3. Mempunyai hak perwalian.

4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
1. Minimal dua orang laki-laki.
 2. Hadir dalam *ijab qabul*.
 3. Dapat mengerti maksud akad.
 4. Islam.
 5. Dewasa.
- e. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 3. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari keduanya.
 4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan, langsung tidak terpisah.
 5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
 6. Orang yang terikat dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah.

7. Majelis *ijab qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁴²

4. Perkawinan Beda Agama Menurut Islam

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim baik pria maupun wanita dengan penganut agama lain (non-muslim) secara keseluruhan, tanpa terkecuali pria dan wanitanya berasal dari agama yang mana. Misalnya perkawinan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan penganut agama Kristen Protestan, atau seorang muslim dengan penganut agama Budha, dan yang lainnya.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan campuran antar agama. Perkawinan ini terjadi jika seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama melakukan

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, cet. I, hlm. 55.

perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.⁴³

Peraturan perkawinan campuran (*Regeling of de gemengde huwelijken*) Pasal 1 menjelaskan “Yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.”⁴⁴

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda agama.

Dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), diakui adanya perbedaan hukum perkawinan dari agama-agama yang berbeda. Akibatnya, di Indonesia ada pluralitas hukum perkawinan yang berbeda satu dengan lainnya. Hal tersebut mengacu pada pengertian “hukum yang berlainan” dalam Pasal 57 UUP.

⁴³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: TERAS, 2009, cet. I, hlm. 41-42.

⁴⁴ Wantjik Saleh, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1974, cet. II, hlm. 9.

Pencatatan perkawinan beda agama ini juga sudah diatur dalam Pasal 35 huruf a jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (*Undang-Undang Adminduk*), yang mengatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan juga dapat dilakukan pencatatan (pada Kantor Catatan Sipil). Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama (penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk).

Dalam agama Islam, ulama berselisih pendapat mengenai sah dan tidaknya pernikahan beda agama. Pertama, ulama yang mengharamkan pernikahan beda agama, dasarnya adalah QS. Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيَّةٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ق وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ...

Artinya: *Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.*⁴⁵

Kedua, Ulama yang membolehkan perkawinan beda agama dengan dasar QS. Al-Ma'idah ayat 5 yang berbunyi:

....وَالْحَاصِّنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَاصِّنَاتُ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

⁴⁵ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 35.

Artinya: *Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya.*⁴⁶

Aturan negara tentang perkawinan pasangan beda agama yang terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyerahkan sepenuhnya pada masing-masing agama menjelaskan bahwa, secara formil pernikahan beda agama dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pencatat Perkawinan selama unsur-unsur materiilnya terpenuhi (termasuk aturan agamanya).

Meski secara yuridis perkawinan beda agama tidak tertutup rapat untuk dilaksanakan, tetapi dalam dataran empiris, perkawinan beda agama sulit untuk dilakukan. Kesulitan dilaksanakannya perkawinan beda agama

⁴⁶ Departemen Agama RI, *ibid*, hlm. 107.

semakin terlihat sejak lahirnya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 tentang keharaman nikah beda agama dan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, yang memutuskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram atau tidak sah,⁴⁷ maka pernikahan beda agama sudah tertutup untuk dilaksanakan atau perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah.

B. Penundukan Hukum

1. Penundukan Hukum

Istilah penundukan hukum terdiri dari dua kata, yaitu penundukan dan hukum. Masing-masing kata mempunyai makna atau arti yang berbeda. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) Penundukan adalah

⁴⁷ *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 481.

perbuatan menundukkan⁴⁸, sedangkan Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.⁴⁹

Dari dua arti atau makna di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penundukan hukum adalah perbuatan menundukkan diri terhadap peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Direktur LPKBHI Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang⁵⁰ dan Praktisi Hukum UIN Walisongo Semarang⁵¹ menjelaskan bahwa bagi seseorang yang memang tidak tunduk kepada suatu hukum tertentu dapat menundukkan diri pada hukum perdata barat baik karena

⁴⁸ Kamus Umum Bahasa Indonesia, hlm. 1105.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 363.

⁵⁰ Wawancara dengan Direktur LPKBHI Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, ibu Anthin Lathifah, M. Ag, pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 pukul 13.30 WIB di Kantor LPKBHI Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

⁵¹ Wawancara dengan Praktisi Hukum & Akademisi UIN Walisongo Semarang, bapak Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag, pada hari Selasa 03 Nopember 2015 pukul 11.30 WIB di Kantor Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

keinginan yang bersangkutan menghendaki atau karena hukum itu sendiri menghendaki demikian. Penundukan hukum menurut Praktisi Hukum dan Akademisi UIN Walisongo Semarang, bapak Drs. H. Eman Sulaiman, M.H., mengatakan bahwa penundukan hukum itu ada tiga, yaitu: penundukan hukum secara total, penundukan hukum secara sebagian, dan penundukan hukum secara sukarela.⁵² Penundukan hukum secara total adalah tunduk dan mengikuti kepada seluruh aturan hukum perdata barat (Pasal 1-17), penundukan hukum secara sebagian adalah menundukan hukum hanya sebagian saja (Pasal 18-25), sedangkan penundukan secara sukarela adalah tunduk dengan sukarela kepada hukum barat mengenai suatu tindakan tertentu (Pasal 26-28). Oleh karena itu, di dalam terminologi hukum dikenal dua jenis penundukan diri yaitu “penundukan diri secara sukarela” atas dasar keinginan

⁵² Wawancara dengan Praktisi Hukum & Akademisi UIN Walisongo Semarang, bapak Drs. H. Eman Sulaiman, M.H, pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 pukul 10.15 WIB di Kantor Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

yang bersangkutan sendiri (*Vrijwillige onderwerping*) dan “penundukan diri secara diam-diam” karena perintah Undang-Undang atau disebut juga dengan istilah “penundukan diri anggapan” (*Verorderstelde onderwerping*).⁵³

Dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut terdapat kata ‘sukarela’ tidak berarti yang dimaksudkan adalah penundukan diri secara sukarela (*Vrijwillge onderwerping*). Kata tersebut erat kaitannya dengan kata sebelumnya yaitu: “dengan sendirinya” sehingga yang dimaksudkan dalam penjelasan tersebut adalah “penundukan diri anggapan” hukum sendiri menghendaki demikian (*Verorderstelde onderwerping*). Dengan demikian dalam perkara perkawinan pasangan beda agama dimana salah satu dari pasangan ada yang tidak beragama Islam maka salah satu pasangan yang akan melangsungkan perkawinan harus menundukkan diri

⁵³ Asis Safioedin, *Beberapa hal tentang Burgerlijke Wetboek*, cet. V, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 11-15.

dengan mengikuti agama ke salah satu agama pasangannya. Cara ini yang kebanyakan dilakukan dalam pernikahan pasangan beda agama. Caranya adalah dengan menundukkan hukum sementara pada salah satu hukum agama pasangannya.

2. Penundukan Hukum Dalam Perkawinan

Penundukan hukum dalam perkawinan di Indonesia telah terjadi sejak lama, dan berlangsung hingga kini. Usaha penundukan hukum ini dilakukan oleh orang-orang yang akan menikah dengan pasangan yang berbeda agama, yang secara administratif tata perkawinan di Indonesia berbeda dengan perkawinan yang dilangsungkan dengan pasangan yang sama agamanya.

Menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada

empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, yaitu:⁵⁴

a. Meminta penetapan Pengadilan

Perkawinan pasangan beda agama dapat dilakukan dengan cara meminta penetapan pengadilan agar dapat dilangsungkan perkawinan beda agama tersebut.

Dalam hal ini, para pelaku pasangan beda agama meminta penetapan Pengadilan terlebih dahulu untuk dapat dilangsungkan perkawinan beda agama. Setelah ditetapkan keputusan pengadilan tersebut, maka pasangan beda agama tersebut dapat melangsungkan perkawinan. Atas dasar penetapan itulah pasangan beda agama dapat melangsungkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil.

Meski pada dasarnya pemerintah Republik Indonesia memberi ruang terhadap pasangan beda

⁵⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama> diakses pada tanggal 17 September 2015 pada pukul 09.00 WIB.

agama yang akan melangsungkan perkawinannya di Indonesia, namun ternyata tidak banyak juga orang-orang yang memanfaatkan keringanan hukum ini. Hal ini dapat dilihat dari cara yang dipilih oleh masyarakat ketika akan melangsungkan perkawinan beda agama.

Pasangan beda agama yang berasal dari keluarga orang kaya atau artis, akan melangsungkan perkawinan beda agama tersebut di luar negeri, baru ketika kembali ke Indonesia meminta penetapan pemerintah Indonesia untuk mengakui perkawinan beda agama tersebut.

Sementara perkawinan pasangan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat bawah atau kurang mampu adalah dengan cara mengikuti salah satu agama yang dianut oleh pasangan beda agama tersebut.

- b. Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, cara kedua yang dilakukan oleh pasangan beda agama untuk

melangsungkan perkawinannya adalah dengan cara melangsungkan ritual pernikahan menurut masing-masing agama calon pengantin tersebut. Ritual atau dilakukannya acara perkawinan menurut masing-masing agama calon pengantin, biasanya terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama mempelai laki-laki (calon suami), baru disusul menurut hukum agama mempelai perempuan (calon istri).

Sayangnya, cara seperti ini sulit diterapkan di Indonesia, terutama jika yang menikah salah satunya beragama Islam. Dalam aturan perundang-undangan Indonesia, dijelaskan bahwa apabila masyarakat Indonesia beragama Islam, maka perkawinan harus dilangsungkan menurut agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan perkawinan di KUA, mengikuti aturan Perkawinan, yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari kedua aturan tersebut

dijelaskan bahwa, orang Indonesia yang beragama Islam dapat melakukan perkawinan dengan sesama agama (Islam) dan dicatatkan oleh pegawai KUA.

c. Mengikuti salah satu agama pasangannya

Cara ketiga untuk melangsungkan perkawinan beda agama menurut Prof. Wahyono Darmabrata adalah dengan menundukkan salah satu agama calon pengantin. Cara inilah yang banyak dilakukan oleh pasangan pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinannya, terutama bagi masyarakat bawah atau masyarakat yang tidak mau direpotkan oleh masalah administratif perkawinan.

Cara perkawinan oleh pasangan beda agama dengan menundukkan hukum sementara pada salah satu hukum agama, misalnya, seorang laki-laki yang beragama Islam akan menikah dengan seorang perempuan yang beragama Hindu, salah satu dari mereka mengganti agamanya yang terdapat dalam

Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan calon pasangannya, kemudian melakukan perkawinan sesuai dengan agama yang dikehendakinya, apakah di Kantor Catatan Sipil atau di Kantor Urusan Agama. Setelah akad perkawinan selesai, maka kedua pasangan tersebut kembali kepada agamanya masing-masing.

d. Menikah di luar negeri

Cara terakhir melangsungkan perkawinan beda agama menurut Prof. Wahyono Darmabrata adalah dengan melakukan perkawinan di luar negeri.

Pasangan beda agama melakukan perkawinan di luar negara Indonesia, kemudian mereka mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk mendapatkan legalisasinya.

Bentuk perkawinan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang berharta banyak, seperti para artis Indonesia.

3. Praktik Perkawinan Pasangan Beda Agama di Indonesia

Beberapa contoh praktik perkawinan pasangan beda agama di Indonesia adalah:

- a. Perkawinan Agung di Keraton Solo Agustus 1986, yang bersandung memang berbeda agama walau keduanya berdarah Indonesia. Pengantin putri, Gusti Raden Ayu Kus Ondowiyah, putri Paku Buwono XII, beragama Islam, sedangkan pengantin putra, Bandoro Raden Mas Susatya, S.H, beragama Kristen. Keduanya memutuskan untuk tetap pada agamanya masing-masing hingga jalan tengah dicari “kawin di Catatan sipil”.
- b. Perkawinan Ir. Sylvanus beragama Kristen dengan G.R.A.Y Kus Supiah beragama Islam. Mereka menikah

tetap pada agamanya masing-masing pada tahun 1975 di keraton Solo.⁵⁵

- c. Perkawinan Galih Prasetyo beragama Katolik, sedangkan istrinya Emi Widiarti beragama Islam. Mereka menikah di KUA pada tahun 1991. Pada saat menikah mengikuti agama istrinya karena permintaan keluarga istri. Setelah menikah suami kembali menjalankan aktifitas agamanya semula yaitu Katolik.⁵⁶
- d. Perkawinan Andy Vonny Gani P beragama Islam, sedangkan suaminya Andrianus Petrus Hendrik Nelwan beragama Kristen Protestan. Mereka menikah di Kantor Catatan Sipil karena permohonan Andy Vonny Gani P dikabulkan oleh Mahkamah Agung.⁵⁷

⁵⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, cet. VI, hlm. 55.

⁵⁶ Rosyidah Widyaningrum, 042111103, *Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.

⁵⁷ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, cet. I, Bandung: Nusa Aulia, 2015, hlm.103.

- e. Lydia Kandaou dengan Jamal Mirdad, mereka menikah pada tahun 1986, Lydia Kandaou beragama Kristen sedangkan Jamal Mirdad beragama Islam. Mereka menikah di Indonesia dan memperjuangkan status mereka mati-matian di Pengadilan Negeri Jakarta. Pernikahan mereka menuai kontroversi. Ditentang dan dikecam oleh para agamawan dan masyarakat. Ibunda Lydia Kandou pun sempat menentang pernikahan tersebut. Namun, setelah 27 tahun bersama, keduanya bercerai pada 4 Juli 2013 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.⁵⁸

Dari kasus di atas, masih banyak kasus perkawinan pasangan beda agama atau perkawinan pasangan yang semula beda agama.

⁵⁸ Siti Baroroh, Disampaikan dalam Seminar Sehari Kajian Kritis atas Perkawinan Beda Agama di Indonesia yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 13 Desember 2014 .

BAB III

**FAKTOR-FAKTOR MASUK ISLAM KARENA ALASAN
PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN PASANGAN YANG
SEMULA BEDA AGAMA DI DESA BORANGAN
KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN**

**A. Gambaran umum masyarakat Desa Borangan Kecamatan
Manisrenggo Kabupaten Klaten**

1. Letak Geografis Desa Borangan

Desa Borangan termasuk wilayah Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, dengan ketinggian 275 m di atas permukaan laut dan suhu rata-rata 27° yang berbatasan dengan;

- Sebelah Utara : Desa Sukorini, Kecamatan Manisrenggo.
- Sebelah Selatan : Desa Tambakan, Kecamatan Jogonalan.

- Sebelah Timur : Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko.
- Sebelah Barat : Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo.

Secara geografis terletak pada $6^{\circ} 51' 46''$ sampai dengan $7^{\circ} 11' 47''$ LS dan $109^{\circ} 40' 19''$ sampai $110^{\circ} 03' 05''$ BT.⁵⁹

2. Luas Wilayah Desa Borangan

Luas wilayah Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten adalah 169.6480 Ha. Yang terbagi dalam 12 wilayah dusun, 12 RW, dan 30 RT. Adapun nama-nama dusun yang ada di Desa Borangan adalah:

Nomor	Nama Dusun	RW	RT
1.	Kedusan	01	RT 01, RT 02
2.	Mranggen	02	RT 03, RT 04, RT

⁵⁹ Data kependudukan Desa Borangan Tahun 2014.

			05
3.	Ngremang	03	RT 06, RT 07
4.	Pungkruk	04	RT 08, RT 09, RT 30
5.	Candran	05	RT 10, RT 11
6.	Jatirejo	06	RT 13, RT 14
7.	Wates	07	RT 15, RT 16
8.	Mrisen	08	RT 17, RT 18
9.	Borangan	09	RT 19, RT 20, RT 21, RT 22
10.	Tempel	10	RT 23, RT 24, RT 25
11.	Candirejo	11	RT 26, RT 27
12.	Sidorejo	12	RT 12, RT 28, RT 29 ⁶⁰

Peruntukan Lahan

⁶⁰ Data kependudukan Desa Borangan Tahun 2014.

Luas Desa Borangan sebesar 169.6480 Ha terbagi menjadi:

Nomor	Peruntukan	Luas	Ket.
1.	Lahan Sawah	100.2240	Ha
2.	Pemukiman/perumahan	51.8458	Ha
3.	Pemakaman/kuburan	0.7500	Ha
4.	Tegal Kas Desa/bangunan umum	1.0940	Ha
5.	Jalan	7.1920	Ha
6.	Sungai	8.5422	Ha ⁶¹

Luas tanah Kas Desa Borangan terdiri dari:

Nomor	Peruntukan	Luas	Ket.
1.	Tanah Sawah	6.9476	Ha
2.	Tanah kering	0.6875 6.2601	Ha – Di gunakan untuk Kantor Desa

⁶¹ Data kependudukan Desa Borangan Tahun 2014.

			– Digunakan untuk TK/SD, Masjid dan lain-lain. ⁶²
--	--	--	--

Tanah Bengkok Perangkat Borangan Ha terdiri dari:

Nomor	Uraian	Luas	Ket.
1.	Bengkok Kepala Desa	2.7395	Ha
2.	Bengkok Sekertaris Desa	1.8095	Ha
3.	Bengkok Kaur Pemerintahan	0.8340	Ha
4.	Bengkok Kaur Pembangunan	1.3190	Ha
5.	Bengkok Kaur Umum	0.7775	Ha
6.	Bengkok Kepala Dusun I	1.0455	Ha
7.	Bengkok Kepala Dusun II	1.0435	Ha ⁶³

⁶² Data Kependudukan Desa Borangan Tahun 2014.

⁶³ Data Kependudukan Desa Borangan Tahun 2014.

3. Jumlah Penduduk Desa Borangan

a. Jumlah Kepala keluarga: 789 KK

b. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin;

Laki-laki : 1.375 orang

Perempuan : 1.414 orang

c. Jumlah penduduk menurut pemeluk agama

Nomor	Agama	Jumlah	Ket.
1.	Islam	2.611	Orang
2.	Kristen	41	Orang
3.	Katolik	4	Orang
4.	Hindu	133	Orang
5.	Budha	-	Orang
6.	Kepercayaan	-	Orang
	Total	2.789	Orang ⁶⁴

d. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

⁶⁴ Data Kependudukan Desa Borangan Tahun 2014.

Nomor	Mata pencaharian	Jumlah	Ket.
1.	PNS	48	Orang
2.	ABRI/POLRI	5	Orang
3.	Pensiunan	20	Orang
4.	Petani	297	Orang
5.	Swasta	149	Orang
6.	Karyawan	-	Orang
7.	Buruh tani	299	Orang
8.	Tukang	31	Orang
9.	Jasa	14	Orang ⁶⁵

e. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Nomor	Tingkatan	Jumlah	Ket.
1.	Tamat SD	546	Orang
2.	Tamat SLTP	337	Orang
3.	Tamat SLTA	420	Orang

⁶⁵ Data Kependudukan Desa Borangan Tahun 2014.

4.	Tamat D1-D3	56	Orang
5.	Tamat S1-S3	71	Orang

f. Jumlah penduduk menurut kelompok umur

Nomor	Umur	Jumlah	Ket.
1.	0-03 Tahun	51	Orang
2.	04-06 Tahun	59	Orang
3.	07-12 Tahun	124	Orang
4.	13-15 Tahun	136	Orang
5.	16-18 Tahun	179	Orang
6.	19 Tahun ke atas	2.748	Orang ⁶⁶

4. Bangunan Desa dan Sarana Umum

- a. Balai Desa : 1 buah, Luas 300 m²
- b. Kantor Desa : 1 buah, Luas 200 m²
- c. Pasar : 1 buah, Luas 1400 m²

⁶⁶ Data kependudukan Desa Borangan Tahun 2014.

d. Tempat Ibadah :

Nomor	Tempat Ibadah	Jumlah	Ket.
1.	Masjid	3	Buah
2.	Musholla	12	Buah
3.	Gereja	-	Buah
4.	Pura	1	Buah ⁶⁷

5. Kondisi Sosial

Kondisi sosial suatu masyarakat berkaitan dengan keadaan kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Kondisi sosial masyarakat ini dilihat dari mata pencaharian penduduknya, agama yang dianutnya, tingkat kesejahteraan masyarakatnya dan nilai atau norma yang dianut masyarakat. Dalam skripsi ini penulis akan menjelaskan kondisi sosial masyarakat Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Klaten.

⁶⁷ Data Kependudukan Desa Borangan Tahun 2014.

Kondisi sosial masyarakat Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten sebagian besar adalah petani. Masyarakat Borangan bertani pada lahan subur yang mereka jadikan sebagai tempat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Selain bertani mata pencaharian masyarakat Borangan adalah wiraswasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Agama atau kepercayaan masyarakat Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten sebagian besar adalah Islam, dan sebagian masyarakat yang lain menganut agama Hindu, Kristen dan Katolik. Namun menurut tokoh agama Islam Desa Borangan, Islam yang mereka anut ada yang Islam KTP, sehingga tidak semua benar-benar menjalankan syari'at Islam. Hal itu terbukti dengan penundukan hukum dengan cara berpindah agama ketika melakukan pernikahan, yang sebelumnya agama mereka berbeda kemudian disamakan ketika melaksanakan

pernikahan, dan setelah pernikahan dilaksanakan mereka kembali pada agama semula seperti sebelum menikah.

B. Praktik Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama masih terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang. Untuk melegalkan perkawinan dari pasangan berbeda agama ini, biasanya para pelakunya masuk Islam karena alasan perkawinan (penundukan hukum). Menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Prof. Wahyono Darmabrata, setidaknya ada empat cara menundukan hukum, yaitu meminta penetapan Pengadilan, mengikuti salah satu agama pasangannya, sama-sama melakukan sesuai agamanya dan menikah di luar negeri.⁶⁸

⁶⁸ http://www.kompasiana.com/tikasinaga/menyiasati-hukum-dalam-perkawinan-beda-agama_55287dab6ea834b4638b4582 diakses pada di akses pada tanggal 02 April 2015 pada pukul 10.00 WIB.

Yang dimaksud penundukan hukum dalam skripsi ini adalah Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten dengan cara masuk Islam atau mengikuti salah satu agama pasangannya.

Berlangsungnya praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama ini terjadi di desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. Bentuk perkawinan ini sudah ada dari masa dahulu sampai masa sekarang. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Borangan, bahwa seluruh agama diakui oleh negara dan diakui hak-haknya, termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan dan hak untuk beragama. Secara administratif, perkawinan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) harus beragama Islam, namun secara hak beragama seseorang boleh memeluk agama yang

diyakini⁶⁹. Dia juga menambahkan bahwa menurut Balai Desa, perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat secara administratif. Dengan demikian, apabila setelah perkawinan itu terjadi, ada salah satu pasangan yang berpindah agama, perkawinan mereka tetap di akui oleh Balai Desa, karena menurut Dia jika salah satu pasangan kembali ke agamanya semula itu adalah hak pribadi nya.

Setelah penulis melakukan observasi data⁷⁰, dapat diketahui bahwa pasangan dari perkawinan yang semula beda agama adalah seorang muslim, baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Untuk mengetahui praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama, disini penulis mewancari enam

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Pitoyo selaku Kepala Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten di Kantor Balai Desa pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 pukul 15.00 WIB.

⁷⁰ Observasi Data di KUA Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

keluarga dari tujuh keluarga yang melakukan perkawinan pasangan yang semula beda agama.⁷¹

Menurut tokoh agama Islam Desa Borangan bahwa perkawinan antar agama itu sudah jelas dilarang dalam agama Islam. Kata dia, bahwa setiap malam jum'at wage dilakukan yasinan, tahlilan dan pengajian untuk memberi tausiah kepada warga tentang perkawinan pasangan yang semula beda agama, bahwa perkawinan antar agama itu hukumnya haram, namun bagaimana lagi kalau aqidah Islam tidak tertanam kuat pada diri mereka (masyarakat), Islam mereka hanya KTP atau Islam abangan (awam), dan yang benar-benar menjalankan syari'at Islam kurang lebih hanya 30% saja.⁷²

Adapun pasangan yang melakukan perkawinan yang semula beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten yaitu:

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Iswanto selaku Ketua RW, Catatan di sekretariat RW, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2015 pukul 16.40 WIB.

⁷² Wawancara tokoh agama Islam Desa Borangan Bapak Siswoyo di rumahnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 pukul 17.15 WIB.

1. Suparman (Hindu) dengan Ngaisah (Islam).
2. Maryono (Hindu) dengan Sungginem (Islam).
3. Resanto (Kristen) dengan Cristiana (Hindu).
4. Suroto (Hindu) dengan Sri Lestari (Islam).
5. Samadi (Hindu) dengan Tatwa (Islam).
6. Hartono (Hindu) dengan Ngatini (Islam).
7. Sumarno (Islam) dengan Sumiyem (Kristen).
8. Wiranto (Hindu) dengan Linawati (Islam)⁷³

Berikut Tabel Kasus pasangan yang melakukan perkawinan beda agama (semula beda agama telah masuk Islam dan kemudian kembali ke agama semula) di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten:

No.	Nama		Agama		Perkawinan di lakukan dengan Agama	Ket.
	Calon suami	Calon Isteri	Suami	Isteri		

⁷³ Wawancara dengan bapak Iswanto selaku Ketua RW, Catatan di sekretariat RW, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2015 pukul 16.40 WIB.

1.	Sumarno	Sumiyem	Islam	Kristen	Islam	Setelah menikah, Sumiyem kembali ke agama semula, sedangkan Sumarno masih tetap agama Islam.
2.	Maryono	Sunggine	Hindu	Islam	Islam	Setelah menikah Maryono kembali ke agama semula, begitupun Sunggine ikut ke agama Maryono.
3.	Suroto	Sri Lestari	Hindu	Islam	Islam	Setelah menikah Suroto kembali ke agama semula,

						Sri Lestari masih tetap di agama semula Islam.
4.	Samadi	Tatwa	Hindu	Islam	Islam	Setelah menikah Samadi kembali ke agama semula, dan Tatwa mengikuti agama Samadi.
5.	Wiranto	Linawati	Hindu	Islam	Islam	Setelah menikah Wiranto kembali ke agama semula, Linawati masih tetap agama Islam.
6.	Suparman	Ngaisah	Hindu	Islam	Islam	Setelah menikah Suparman kembali

						ke agama semula, dan Ngaisah pindah ke agama Suparma n.
7.	Harton o	Ngatini	Hin du	Isla m	Islam	Tidak bersedia di wawanca rai.

Sumber: Wawancara dengan Responden.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19784 tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karenanya dalam Undang-Undang yang sama diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya, serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴

Jadi bisa disimpulkan ketika salah satu pihak calon mempelai melakukan perpindahan agama, perkawinannya pun sah menurut hukum yang berlaku, namun hal ini berarti sang calon mempelai melakukan penundukan hukum. Karena calon mempelai hanya menyiasati supaya pernikahannya sah secara hukum, seperti dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung mempelai kembali kepada agama semula.

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Muhammad Ashonany selaku Kepala KUA Kecamatan Manisrenggo, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manisrenggo pada hari Jum'at tanggal 01 April 2015 pukul 14.00 WIB.

**C. Faktor-faktor Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan
Dalam Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama
di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten
Klaten**

Untuk mengetahui faktor-faktor masuk Islam karena alasan perkawinan dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, penulis melakukan wawancara kepada pelaku penundukan hukum dalam perkawinan yang semula beda agama di desa tersebut. Pasangan atau pelaku yang semula beda agama melakukan cara penundukan hukum dengan menundukkan atau mengganti salah satu agama calon mempelai kepada agama mempelai yang lainnya, kemudian melakukan proses perkawinan sesuai dengan agama yang dipilih, dan setelah menikah pasangan tersebut kembali kepada agama masing-masing.

Dari hasil wawancara penulis terhadap para pelaku masuk Islam karena alasan perkawinan dalam perkawinan

yang semula beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten diperoleh informasi, bahwa faktor-faktor masuk Islam karena alasan perkawinan tersebut di antaranya: ketaatan terhadap orang tua, kemudahan administrasi perkawinan (pencatatan perkawinan), ketidak tahuan ajaran agama.

1. Ketaatan kepada orang tua

Salah satu faktor yang menjadi penyebab perbuatan penundukan hukum oleh masyarakat desa Manisrenggo dalam perkawinan yang semula beda agama adalah karena ketaatan terhadap orang tua. Dalam masyarakat desa di Jawa, dikenal istilah perjodohan, yaitu orang tua memilihkan calon pengantin kepada anaknya.

Perjodohan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa. Dengan perjodohan, maka calon mempelai yang akan dijadikan suami atau istri sudah diketahui oleh orang tua. Dalam menjodohkan anaknya

dengan pilihannya sebagai calon mempelai, orang tua sudah mengetahui kualitas dari calon mempelai atau keluarga calon mempelai tersebut. Istilah Jawa yang tepat untuk mengetahui kualitas calon mempelai atau keluarga mempelai adalah orang tua memperhatikan *bibit*, *bobot*, dan *bebet*-nya.

Kualitas calon mempelai dan keluarga calon mempelai yang dalam adat Jawa dikenal dengan *bibit*, *bobot*, dan *bebet*, maka dalam Islam juga dikenal dengan istilah *jamal*, *mal*, *hasab* (*nasab*), dan *din*. Hal ini terlihat dari hadis Nabi Muhammad saw. yang menganjurkan kepada setiap orang yang akan menikah hendaknya memperhatikan calon mempelainya dalam 4 hal; *jamal*, *mal*, *hasab* (*nasab*), dan *din*. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah ra.

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا

وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ ثَرَبَتْ يَدَاكَ.

(متفق عليه)⁷⁵

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang kuat agamanya, engkau akan berbahagia. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)*

Dengan diketahuinya kualitas calon mempelai yang akan dinikahkan dengan anak dari orang tua yang menjodohkan, maka orang tua setidaknya sudah menjamin awal dari kebahagiaan putra atau putrinya. Jaminan kebahagiaan ini terlihat dari Hadis Nabi Muhammad saw. di atas yang menyuruh umat Islam agar memperhatikan beberapa hal sebelum menikah. Perintah Nabi Muhammad saw. ini tentu mempunyai maksud dan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Jaminan awal kebahagiaan pernikahan orang Jawa terlihat dalam pemilihan *bibit*, *bobot* dan *bebet*-nya.

⁷⁵ Imam Ash-Shon'ani, *Subulus Salam*, juz III, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, hlm. 111.

Dengan demikian, masyarakat Jawa sudah terbiasa dengan adanya perjodohan dalam pernikahan. Perjodohan dilakukan setelah mengetahui kualitas calon mempelai dan keluarganya demi meraih kebahagiaan pernikahan.

Atas dasar inilah, masyarakat Jawa yang dijodohkan oleh orang tua-nya akan menaati perjodohan tersebut. Ketaatan terhadap orang tua dalam perjodohan tidak lain demi mewujudkan kebahagiaan pernikahannya kelak.

Salah satu responden yang telah penulis mintai keterangan adalah pernikahan antara Bapak Suparman dengan Ibu Ngaisah. Ibu Ngaisah yang beragama Islam menjelaskan bahwa ia dijodohkan oleh orang tuanya dengan Bapak Suparman yang beragama Hindu. Ibu Ngaisah menerima perjodohan perkawinan dengan orang yang tidak seagama tersebut karena orang tua telah melihat kualitas calon mempelai dari sisi etos kerjanya dan sopan santun dalam masyarakat, serta masih saudara.

Ibu Ngaisah juga menuturkan bahwa ia menerima perjodohan tersebut karena ketaatan terhadap orang tua, ia tidak mau mengecewakan orang tuanya dan dikatakan sebagai anak yang tidak mau taat pada orang tua (durhaka).

Akhirnya, mereka berdua menikah pada tahun 2003, Bapak Suparman pun melakukan penundukan hukum dengan cara masuk Islam sebagai seorang muallaf. Mereka berdua melakukan perkawinan menggunakan tata cara perkawinan Islam. Beliau menikah pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2003 M / 21 Jumadil Akhir 1424 H pukul 15.00 WIB di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manisrenggo. Namun setelah menikah dengan ibu Ngaisah, bapak Suparman kembali pada keyakinan semula, yaitu Hindu, dan dia mengubah KTP menjadi agama Hindu.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara dengan pelaku pasangan perkawinan yang semula beda agama, ibu Ngaisah, di rumahnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 pukul 16.45 WIB.

Responden lain yang penulis ambil sebagai bagian dari pelaku pasangan yang semula agama dengan faktor karena ketaatan pada orang tua (dijodohkan) adalah perkawinan antara bapak Sumarno dengan ibu Sumiyem. Pernikahan antara bapak Sumarno dengan ibu Sumiyem karena dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing, dan kedua calon mempelai tidak dapat menolak. Alasan yang dikemukakan adalah karena mereka ingin berbakti kepada orang tua dan tidak ingin memutus tali persaudaraan di antara mereka. Sebab, di antara keluarga bapak Sumarno dengan ibu Sumiyem adalah saudara.

Agama yang semula dibawa oleh calon mempelai sebelum menikah adalah bapak Sumarno beragama Islam dan ibu Sumiyem beragama Kristen. Pada saat menikah, ibu Sumiyem menundukkan diri menjadi Islam dengan cara merubah status agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi agama Islam. Kemudian mereka melakukan akad perkawinan dengan cara Islam. Setelah

menikah ibu Sumiyem kembali ke agamanya semula yaitu Kristen.

Mereka mempunyai tiga orang anak, anak pertama ikut agama bapak Sumarno yaitu agama Islam, anak kedua ikut agama ibunya yaitu agama Kristen. Sedangkan anak ketiga masih kecil, jadi belum memilih agama yang akan di anutnya. Semua anak-anaknya ketika masih kecil diajarkan agama dari bapak Sumarno dan agama ibu Sumiyem.⁷⁷

Faktor ketaatan pada orang tua dengan jalan perjodohan yang terjadi pada perkawinan yang semula beda agama di desa Borangan kecamatan Manisrenggo kabupaten Klaten tidak semua pasangan pengantin menundukkan diri pada agama Islam, namun sebaliknya mereka menundukkan agama Islam ke agama lainnya. Ada responden lain yang tidak bersedia untuk diwawancarai dan menjelaskan secara rinci bagaimana

⁷⁷ Wawancara dengan pelaku pasangan perkawinan yang semula beda agama, Bapak Sumarno dengan Ibu Sumiyem, di rumahnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 pukul 20.15 WIB.

proses perkawinan mereka. Responden tersebut hanya menyebutkan bahwa mereka menikah dengan orang yang berbeda agama karena ketaatan pada orang tua (dijodohkan) dan melakukan perkawinan dengan cara menundukkan agama Islam ke agama lain (murtad), sehingga perkawinannya terjadi di Kantor Kecamatan Sipil.

Dalam perkawinan yang semula beda agama dengan faktor ketaatan pada orang tua melihat bagaimana cara pandang orang tua terhadap putra-putrinya yang akan menikah, bukan melihat dari sisi kemudahan administrasi perkawinan. Sebab, ada yang melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS).

2. Kemudahan administrasi perkawinan.

Faktor kedua dari penundukan agama dalam perkawinan yang semula beda agama di desa Borangan kecamatan Manisrenggo adalah faktor untuk memudahkan administrasi perkawinan. Perkawinan

dengan faktor kedua ini melihat bagaimana agar perkawinan yang berbeda agama dapat dilegalkan oleh negara dengan cara yang mudah. Cara yang ditempuh adalah dengan cara menundukkan hukum atau agama selain Islam kepada agama Islam. Cara ini dipandang mudah karena secara administratif, perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) lebih mudah dibandingkan dengan perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Dari penuturan para responden, didapatkan informasi bahwa penundukan hukum dalam perkawinan yang semula beda agama dengan faktor kemudahan administrasi berangkat dari “rasa cinta” atau “kasih sayang” yang terjadi di antara kedua calon pengantin yang berbeda agama. Mereka saling mencintai masing-masing calon pasangannya tanpa menghiraukan agamanya. Rasa cinta dari pasangan beda agama ini

mengalahkan pengetahuan mereka tentang tidak bolehnya menikah dengan orang yang selain agamanya.

Dari hasil wawancara penulis dengan para responden yang menikah karena faktor kemudahan administrasi perkawinan dengan dasar rasa suka sama suka diperoleh informasi bahwa di antara mereka sudah ada yang tahu tentang pelarangan nikah beda agama, juga ada yang belum tahu. Dengan menghiraukan pelarangan tersebut, mereka mengambil langkah untuk menikah dengan cara yang termudah, kemudian dapat kembali ke agama semula. Cara termudah untuk menikah pada saat mereka akan melangsungkan perkawinan adalah cara yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau menurut cara Islam. Bukan cara agama selain Islam (Hindu misalnya) yang terlalu ribet dan rumit, dan lama prosesnya di Kantor Catatan Sipil.

Berikut contoh penuturan responden yang berhasil penulis gali informasinya, yang menikah karena

faktor kemudahan administrasi perkawinan. Perkawinan Bapak Maryono yang beragama Hindu dengan Ibu Sungginem yang beragama Islam. Bapak Maryono menjelaskan bahwa dulu ketika mau menikah dengan ibu Sungginem itu atas dasar suka sama suka, bapak Maryono beragama Hindu sedangkan ibu sungginem beragama Islam. Ketika bapak Maryono mau menikah dengan ibu Sungginem, bapak Maryono melakukan penundukan hukum dengan cara mengganti agama dia ke agama calon istrinya yaitu Islam.

Atas dasar rasa suka sama suka di antara calon pengantin yang berbeda agama, mereka memilih menikah dengan cara agama Islam. Pada saat itu, perkawinan dengan agama Islam tidak sulit seperti perkawinan yang dilakukan dengan agama Hindu. Pada tahun 1988 mereka menikah dengan cara Islam sesuai dengan agama Ibu Sungginem, dan Bapak Maryono mengganti agamanya menjadi Islam. Setelah menikah,

Bapak Maryono kembali kepada agama semula yaitu Hindu, dan lambat laun seiring berjalannya waktu, maka Ibu Sungginem juga ikut pada agama Bapak Maryono, yaitu Hindu. Saat ini mereka dikaruniai tiga anak, dan semuanya ikut agama Hindu.⁷⁸

Contoh kasus perkawinan yang semula beda agama karena faktor kemudahan administrasi perkawinan adalah perkawinan antara Bapak Suroto yang beragama Hindu dengan Ibu Sri Lestari yang beragama Islam. Setelah penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suroto, beliau menuturkan bahwa ketika memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan yaitu Hindu dengan Islam, mereka sepakat untuk melakukan perkawinan dengan cara Islam karena dianggap lebih mudah tata cara atau pelaksanaannya. Dengan demikian, Bapak Suroto melakukan penundukan hukum dari agama Hindu ke agama Islam. Setelah

⁷⁸ Wawancara dengan pelaku pasangan perkawinan yang semula beda agama, bapak Maryono, di rumahnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 pukul 17.15 WIB.

menikah, bapak Suroto kembali ke agama semula, dan ibu Sri Lestari masih tetap beragama Islam. Perkawinan Bapak Suroto dengan Ibu Sri Lestari ini sudah berlangsung selama 11 tahun dan tidak ada masalah besar yang sampai mengakibatkan perceraian.⁷⁹

Selain faktor ini, menurut penjelasan responden kedua yaitu Bapak Suroto dan Ibu Sri Lestari, mereka tidak paham tentang ajaran agama yang tidak membolehkan seseorang untuk menikah dengan agama lain, atau pengetahuan tentang keluar masuknya (pindah) agama atau murtad.

3. Ketidak tahuan Ajaran Agama

Faktor ketiga dari penundukan hukum dalam perkawinan yang semula beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten adalah faktor ketidak tahuan ajaran agama. Faktor ketidak tahuan

⁷⁹ Wawancara dengan pelaku pasangan perkawinan yang semula beda agama, Bapak Suroto dengan Ibu Sri Lestari di rumahnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 pukul 18.30 WIB.

ajaran agama ini penulis dapat dari informasi responden yang melakukan perkawinan yang semula beda agama, bahwa mereka menuturkan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka atau cinta terhadap seseorang. Ajaran agama tentang pelarangan menikah dengan selain agamanya tidak dipahami oleh mereka dan mereka juga tidak memahami bagaimana hukum orang yang berpindah agama. Menurut mereka, perkawinan tidak perlu mempermasalahkan perbedaan agama, tetapi perkawinan harus didasari atas rasa saling memahami dan mengerti satu individu dengan individu lainnya.

Contoh responden yang melakukan perkawinan karena faktor ini adalah perkawinan bapak Samadi dan ibu Tatwa. Menurut bapak Samadi perkawinan mereka berbeda agama, tetapi dilandasi dengan rasa saling mencintai, sehingga mereka mengesampingkan perbedaan agama. Sebelum menikah, mereka sepakat untuk kedepannya tidak mempermasalahkan dalam

perbedaan agama dan yang ada hanya rasa saling mengerti dan memahami. Menurut ibu Tatwa, ketika berkeluarga yang paling penting adalah saling pengertian dan komunikasi yang terjaga supaya keluarga bisa langgeng. Kemudian mereka menikah secara Islam, dan bapak Samadi berpindah agama ke agama Islam supaya bisa menikah dengan ibu Tatwa. Namun setelah menikah, bapak Samadi kembali ke agama semula

Namun demikian, mereka juga menuturkan bahwa selain faktor ketidak tahuan ajaran agama tentang pelarangan menikah berbeda agama dan berpindah agama (murtad), mereka menjelaskan bahwa pada saat itu, menikah selain dengan agama Islam itu di persulit, yaitu pada masa setelah orde baru.⁸⁰

Contoh responden selanjutnya adalah perkawinan antara Bapak Wiranto dengan Ibu Linawati. Sama halnya

⁸⁰ Wawancara dengan pelaku pasangan perkawinan yang semula beda agama, Bapak Sumadi dan Ibu Tatwa, di rumahnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 kul 19.00 WIB.

dengan pasangan suami istri beda agama bapak Samadi dan ibu Tatwa, bapak Wiranto dan ibu Linawati merupakan pasangan suami istri beda agama dengan faktor ketidak tahuan tentang ajaran agama.

Perkawinan mereka dilandasi dengan rasa suka sama suka, sehingga melupakan ajaran agama yang melarang seseorang untuk menikah dengan selain agamanya dan ajaran agama yang melarang untuk berpindah-pindah agama (murtad). Sebelum menikah mereka sudah mengenal dekat selama 2 tahun, sehingga mereka menempuh jalur perkawinan dengan cara Islam yang dianggap lebih mudah. Setelah menikah mereka kembali dengan agama masing-masing. Menurut mereka selama pernikahan tidak ada masalah yang berhubungan dengan perbedaan agama hingga sekarang sudah

dikaruniai dua anak yang pertama ikut agama bapak Wiranto dan anak kedua ikut agama ibu Linawati.⁸¹

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa responden perkawinan yang semula beda agama dengan berbagai faktor yang mendasari di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan masuk Islam karena alasan perkawinan dengan cara berpindah agama satu ke agama lain adalah untuk melegalkan perkawinan mereka, agar menjadi perkawinan yang sah secara hukum yang ada di Indonesia.⁸²

⁸¹ Wawancara dengan pelaku pasangan perkawinan yang semula beda agama, Bapak Wiranto dengan Ibu Linawati, di rumahnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 pukul 19.45 WIB.

⁸² Wawancara dengan tokoh agama Islam Desa Borangan, Ustadz Siswoyo, di rumahnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 pukul 17.15 WIB.

BAB IV

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR MASUK ISLAM KARENA ALASAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN PASANGAN YANG SEMULA BEDA AGAMA DI DESA BORANGAN KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN

A. Analisis Terhadap Praktik Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten

Setelah penulis observasi data-data dan juga hasil wawancara dengan narasumber maka penulis dapat menganalisa bahwa sebenarnya praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama di Indonesia ini masih terjadi sampai sekarang. Masyarakat di Indonesia adalah masyarakat plural yang menyebabkan perkawinan beda agama tidak dapat di hindarkan. Praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama masih berlangsung di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo

Kabupaten Klaten sampai sekarang. Mereka melakukan perkawinan ini dengan cara masuk Islam atau menundukkan hukum sementara pada salah satu hukum agama pasangannya dan setelah menikah, mereka kembali ke agama semula, sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Borangan, bahwa seluruh agama yang diakui oleh negara itu diakui hak-haknya, termasuk hak untuk melangsungkan perkawinan dan hak untuk beragama.⁸³ Secara administratif, perkawinan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) harus beragama Islam, namun secara hak beragama seseorang boleh memeluk agama yang diyakininya. Sedangkan menurut Balai Desa, perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat secara administratif.

Dengan demikian, bila setelah perkawinan ada salah satu pasanganyang berpindah agama, maka perkawinan mereka tetap

⁸³ Wawancara dengan Bapak Pitoyo selaku kepala Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten di Kantor Balai Desa pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 pukul 15.00 WIB.

di akui oleh Balai Desa, karenakembalinya salah satu pasangan ke agamanya semula itu adalah hak pribadinya.

Sebelum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang ada di Indonesia lahir, perkawinan diatur dalam beberapa aturan hukum, baik hukum agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha ataupun hukum Adat. Ketentuan perkawinan campuran diatur dalam Staatsblad 1898 No. 158 dimana Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud “perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.” Dengan demikian, perkawinan campuran merupakan perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan termasuk di dalamnya perkawinan beda agama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa “perbedaan agama, bangsal atau asal itu sama sekali bukan menjadi halangan untuk perkawinan itu.”

Sedangkan perkawinan beda agamatidak di atur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, pasal 8 huruf f perkawinan dilarang antara dua orang yang; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Namun pasal 35 huruf a jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) menjelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dapat di catatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Disini negara seolah-olah membolehkan perkawinan beda agama, karena tidak mungkin perkawinan beda agama dicatatkan kalau sebelumnya tidak pernah ada perkawinan. Yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan

antar-umat yang berbeda agama. Disisi lain, semula Mahkamah Agung (MA) berpendirian bahwa dalam hal terjadinya perkawinan beda agama, peraturan perkawinan campuran Stb. 1898 Nomor 158 masih tetap berlaku.⁸⁴ Bila terjadi ada perkawinan beda agama masih berpegang kepada ketentuan lama yaitu Pasal 6 dari *Regeling op de Gemengde Huwelijken* Staatsblad 1898 Nomor 158, yang menjadi rujukan dari Pasal 66⁸⁵ Undang-Undang Perkawinan.

Pada garis besarnya, ada tiga pandangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia terkait dengan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

⁸⁴ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, cet. I, hlm.99 dan 103.

⁸⁵ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwerlijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1993 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwerlijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

1. Perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menjelaskan hal itu. oleh karena itu, perkawinan beda agama hukumnya tidak sah dan batal demi hukum, berdasarkan Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221.
2. Perkawinan beda agama diperbolehkan dan sah karena perkawinan beda agama itu termasuk dalam perkawinan campuran. Dasarnya pada pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 35 huruf a jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 5.
3. Undang-Undang ini tidak mengatur masalah perkawinan beda agama. Oleh karena itu dengan merujuk pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, maka peraturan-peraturan

lama tetap diberlakukan sepanjang Undang-Undang Perkawinan belum atau tidak mengaturnya.

Mencermati pendapat-pendapat diatas, penulis cenderung kepada pendapat M. Idris Ramulyo – memang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim ataupun wanita muslim dengan laki-laki non-muslim, namun Undang-Undang tersebut secara tegas menyerahkan sah atau tidaknya perkawinan kepada agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.⁸⁶ Ketentuan Pasal 2 ayat 1 tentang keabsahan perkawinan sebenarnya adil karena “perkawinan dianggap sah berdasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Namun yang menjadi persoalan adalah penafsiran para tokoh agama, masyarakat dan penegak hukum terhadap ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal tersebut. Boleh tidaknya perkawinan beda agama sangat tergantung pada masing-masing hukum

⁸⁶ Khutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: TERAS, 2009, cet. I, hlm. 49.

agamanya. Terkait dengan hukum Islam, ketentuan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, walaupun kita ketahui bahwa para ulama berselisih pendapat mengenai sah dan tidaknya pernikahan beda agama itu. Demikian pula dengan agama lain, agama lain pun menghindari atau tidak membolehkan perkawinan beda agama. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari agama lain akan mengizinkannya dengan catatan harus memenuhi syarat tertentu.

Islam juga tidak mengenal perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan campuran karena perkawinan yang diperkenankan yang diatur ketentuannya sebagai dispensasi dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 5 tidaklah termasuk perkawinan dengan penganut-penganut agama Islam sebelum Nabi Muhammad saw. Dalam agama Islam, ulama berselisih pendapat mengenai sah dan tidaknya pernikahan beda agama. Pertama, ulama yang mengharamkan pernikahan beda agama, dasarnya adalah QS. Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ق وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ...

Artinya: *Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang-orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.*⁸⁷

Dalam kaitan ini baik ditinjau asbabun nuzul (sebab-sebab turunnya Al-Qur'an) surah Al-Baqarah ayat 221 tersebut, bahwa Ibnu Abi Mursid Chanawi memohon izin kepada Nabi Muhammad saw agar dia diizinkan menikah dengan seorang wanita musyrik yang sangat cantik dan amat terpendang dalam kaumnya. Pada waktu itu Rasulullah saw berdo'a kepada Allah, maka turunlah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 tersebut,

⁸⁷ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 35.

yang melarang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik, dan wanita muslim menikah dengan laki-laki musyrik.

Demikian juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, yang memutuskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram atau tidak sah.⁸⁸

Kedua, Ulama yang membolehkan perkawinan beda agama dengan dasar QS. Al-Ma'idah ayat 5 yang berbunyi:

....وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

Artinya: *Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum*

⁸⁸Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 481.

*kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya.*⁸⁹

Hadits Rasulullah saw telah menjelaskan tentang kebiasaan orang memilih calon pasangan, dan menganjurkan pada pilihan yang terbaik, yaitu yang kuat agamanya:

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال؛ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ
بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang kuat agamanya, engkau akan berbahagia. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).*⁹⁰

Hadits diatas dengan jelas menerangkan bahwasanya wanita itu dinikahi karena empat hal; harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Tetapi wanita yang mampu

⁸⁹ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 107.

⁹⁰ Imam Ash-Shon’ani, *Subulus Salam*, juz III, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, hlm. 111.

membahagiakan suami adalah wanita yang kuat agamanya. Bahkan Rasulullah saw memberi rambu-rambu dalam memilih calon isteri dengan Sabdanya:

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُرْدِيهِنَّ، وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُعْطِيهِنَّ
وَأَنْكِحُوا لِلدِّينِ، وَلَأُمَّةٍ سَوْدَاءُ خَرَقَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ. (ابن ماجه
والبزار والبيهقي عن عبد الله عمرو)⁹¹

Artinya: *Kalian jangan memperisteri wanita-wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu akan menjadikan rendah karena suatu saat hilang, dan jangan kalian memperistri wanita-wanita karena kekayaannya, karena kekayaannya itu membuat mereka sombong terhadapmu, tetapi nikahilah wanita-wanita yang punya (kuat) agama, budak perempuan yang bodoh tetapi punya (kuat) agama itu lebih baik. (HR. Ibnu Majjah Al-Bazzar Al-Baihaqi Hadits Marfu' dari sahabat Abdullah Ibn 'Amr).*

Dalam hadits tersebut Rasulullah saw telah menjelaskan alasan, mengapa beliau melarang seorang wanita dinikahi dan

⁹¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Syaukani, *Nailul Author*, Juz VI, Dar al-Fikr, hlm. 233.

sekaligus beliau memberi solusi wanita mana yang lebih baik (utama) dinikahi.

B. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Masuk Islam Karena Alasan Perkawinan Dalam Perkawinan Pasangan Yang Semula Beda Agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten

Menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Prof. Wahyono Darmabrata, setidaknya ada empat cara menundukan hukum, yaitu:

1. Meminta penetapan Pengadilan

Dalam hal ini, para pelaku pasangan beda agama meminta penetapan Pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil.

2. Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama

Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), baru disusul menurut hukum agama mempelai berikutnya.

3. Mengikuti salah satu agama pasangannya

Cara ini yang kebanyakan dilakukan dalam pernikahan pasangan beda agama. Caranya adalah dengan masuk Islam (menundukkan hukum) sementara pada salah satu hukum agama yang dianut oleh salah satu pasangan suami-isteri. Misalnya, seorang laki-laki yang beragama Islam akan menikah dengan seorang perempuan yang beragama Hindu, salah satu dari mereka meninggalkan dan mengganti agamanya yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan calon pasangannya, kemudian mereka melakukan perkawinan sesuai dengan agama yang dikehendakinya, apakah di Kantor Catatan Sipil atau di Kantor Urusan Agama. Setelah berlangsung akad perkawinan, kedua pasangan tersebut dikemudian hari kembali kepada agamanya masing-masing.

Cara ketiga dari penundukan hukum dalam perkawinan dengan berpindah agama kepadalah satu calon pengantin merupakan cara yang dipakai oleh masyarakat desa Borangan yang melakukan perkawinan beda agama. Penundukan hukum dalam perkawinan dengan cara berpindah agama ke salah satu agama pasangannya sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. Karena masyarakat disana hidup berdampingan antara agama satu dengan agama yang lain dengan rukun. Sudah menjadi kebiasaan ketika di dalam keseharian mereka menjumpai agama yang berbeda-beda. Masyarakat Desa Borangan ini terdapat bermacam-macam agama, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu.

4. Menikah diluar negeri

Pasangan beda agama melakukan perkawinan diluar negara Indonesia, kemudian mereka mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk

mendapatkan legalisasinya. Bentuk perkawinan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berharta.

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber seperti: Kepala Desa Borangan, Kepala KUA Kecamatan Manisrenggo, Ketua RW Desa Borangan, Tokoh Agama Islam Desa Borangan dan yang paling khusus adalah pelaku penundukan hukum dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama. Adapun pasangan yang melakukan perkawinan yang semula beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, antara lain:

1. Suparman (Hindu) dengan Ngaisah (Islam).
2. Maryono (Hindu) dengan Sungginem (Islam).
 - a) Resanto (Kristen) dengan Cristiana (Hindu).
3. Suroto (Hindu) dengan Sri Lestari (Islam).
4. Samadi (Hindu) dengan Tatwa (Islam).
5. Hartono (Hindu) dengan Ngatini (Islam).
6. Sumarno (Islam) dengan Sumiyem (Kristen).
7. Wiranto (Hindu) dengan Linawati (Islam).

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap pelaku yang melakukan perkawinan pasangan yang semula beda agama dengan cara menundukkan hukum, didapati informasi bahwa faktor-faktor masuk Islam karena alasan perkawinan dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama di Desa Borangan adalah ketaatan terhadap orang tua (perjodohan), kemudahan administrasi perkawinan dan ketidak tahuan ajaran agama.

1. Faktor ketaatan terhadap orang tua

Faktor ketaatan terhadap orang tua menjadi salah satu penyebab pelaku perkawinan yang berbeda agama untuk melakukan tindakan penundukan hukum atau masuk Islam (mengganti agamanya). Faktor ini terlihat dalam perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Dalam perjodohan untuk pernikahan, orang Jawa berpedoman pada filosofi Jawa yaitu *bibit*, *bebet* dan *bobot*-nya.

Bibit merupakan istilah orang Jawa untuk melihat asal usul calon mempelai atau keturunan siapa. Jangan sampai

memilih menantu bagai memilih kucing dalam karung yang asal-usulnya tidak jelas, keluarganya juga remang-remang. Ada sifat-sifat atau tingkah laku yang merupakan pewarisan dari asal usul induknya, seperti sifat pendiam, cerewet, dominan atau pasif. Sifat-sifat ini merupakan sifat alamiah manusia yang merupakan turunan dari generasi sebelumnya. Pemilihan *bibit* merupakan salah satu alternatif yang bijak untuk menjaga keturunan yang baik (bukan harus dari keluarga darah biru).

Bebet merupakan status sosial (harkat dan martabat) yang melekat pada calon mempelai. Masyarakat Jawa juga memperhatikan *bebet* dalam memilihkan jodoh untuk anaknya.

Bobot adalah kualitas diri calon menantu baik lahir maupun batin. Kualitas diri ini meliputi keimanan (kepahaman agamanya), pendidikan, pekerjaan, kecakapan, dan perilaku. Konsep *bobot* dalam pemilihan jodoh dalam perkawinan diterapkan dalam rangka memberi

perlindungan, kasih sayang dan penghormatan bagi anaknya. Kualitas calon menantu harus dapat menghadirkan kebahagiaan, kasih sayang, tanggung jawab dalam keluarga.

Jaminan awal kebahagiaan pernikahan orang Jawa terlihat dalam pemilihan *bibit*, *bobot* dan *bebet*-nya. Dengan demikian, masyarakat Jawa sudah terbiasa dengan adanya perjodohan dalam pernikahan. Perjodohan dilakukan setelah mengetahui kualitas calon mempelai dan keluarganya demi meraih kebahagiaan pernikahan.

Dari perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Borangan perlu diperhatikan mengenai pemilihan *bobot* yang menampilkan adanya keimanan atau kepahaman ajaran agama yang berbeda. Apakah perbedaan keimanan atau ajaran agama ini tidak akan menjadi masalah dikemudian hari kelak, terutama bagi anak-anaknya? Apakah diperbolehkan paham ajaran atau keimanan masing-masing pelaku penundukan hukum

untuk menikah dengan orang yang berbeda paham ajaran agama atau keimanan? Bagaimana status hukum orang yang mempermainkan paham ajaran agama atau keyakinan hanya untuk keperluan administrasi perkawinan?

Pertanyaan-pertanyaan di atas seharusnya dipikirkan oleh masyarakat desa Borangan. Karena menurut penulis, memang seharusnya anak berbakti terhadap orang tua (mentaati orang tua), termasuk dalam perjodohan perkawinan. Namun perlu diperhatikan, bahwa dalam perjodohan selalu mempertimbangkan *bibit*, *bebet* dan *bobot*-nya. Dalam pemilihan *bobot* selalu mempertimbangkan paham ajaran agama atau keimanan calon menantu. Pada dasarnya masyarakat Jawa memilih *bobot* dengan pertimbangan iman atau paham agama yang sama. Apabila perjodohan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Borangan yang tidak memperhatikan dasar keimanan atau paham agama yang sama, maka

ketaatan terhadap orang tua perlu dipertimbangkan kembali.

Faktor ketaatan terhadap orang tua dalam Islam juga merupakan suatu keharusan. Dalil Al-Qur'an dan Hadis menyebutkan umat Islam harus taat atau patuh terhadap orang tua. Salah satu dalil Al-Qur'an yang menyebutkan kewajiban untuk menaati orang tua adalah Surat Al-Ankabut ayat 8:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

Artinya: *Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya.*⁹²

Sebaliknya, anak tidak boleh menyakiti orang tua. Di antara dalil-dalilnya adalah Surat Al-Baqarah ayat 233:

... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ...

Artinya: *Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya.*⁹³

⁹² Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 397.

Ketaatan terhadap orang tua merupakan keharusan dalam agama Islam. Ketika orang tua akan menjodohkan anaknya, maka ajaran Nabi Muhammad saw. menjelaskan bahwa ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu: *jamal*, *hasab* (*nasab*) *mal* dan *din*.

Sabda Rasulullah saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah ra.

وعن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى
الله عليه وسلم قال؛ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَـذَاكَ. (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang kuat

⁹³ Departemen Agama RI, *ibid*, hlm. 37.

agamanya, engkau akan berbahagia. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)⁹⁴

Dari keempat kriteria yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw. maka kriteria agama menjadi paling penting di antara kriteria-kriteria yang lain. Oleh sebab itu, faktor ketaatan terhadap orang tua dalam pernikahan harus memperhatikan dasar agama. Dan apabila tidak sesuai dengan ajaran agama, maka anak tidak harus menaati orang tua. Agama menjadi suatu yang fundamental dalam agama Islam, sehingga agama selain Islam tidak diterima oleh Allah SWT.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Artinya: *Sesungguhnya agama (yang diridhai) oleh Allah adalah agama Islam.*

Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua yang tidak memperhatikan agama, maka tidak perlu ditaati. Apalagi

⁹⁴ Imam Ash-Shon'ani, *Subulus Salam*, juz III, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, hlm. 111.

yang akan menjadikan seseorang menyekutukan kepada Allah SWT. Misalnya kasus perjodohan masyarakat desa Borongan yang kemudian menjadikan umat Islam untuk keluar dari agamanya (murtad) atau mengakui imam keluarga (suami) yang tidak seiman dengannya. Firman Allah dalam Surat Luqman ayat 15 menjelaskan bahwa anak tidak boleh menaati orang tua apabila akan berindikasi pada persekutuan kepada Allah SWT.

وَأِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ
مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

Artinya: *Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku.*⁹⁵

⁹⁵ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 412.

Ayat ini menerangkan kepada manusia sebagai anak agar tidak harus menaati kepada orang tua yang dapat menyebabkan kepada persekutuan kepada Allah. Meski tidak harus menaati, tetapi manusia sebagai anak tetap diharuskan untuk menghormati orang tua dengan jalan bergaul dengan cara yang baik.

Hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menjelaskan:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

Artinya: *Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq.*⁹⁶

Dari kedua dalil di atas dapat disimpulkan bahwa, meski perjudohan yang dilakukan oleh orang tua adalah demi kebaikan anaknya dengan memperhatikan kualitas calon menantunya, tetapi perjudohan yang tidak seagama atau yang menyebabkan keluar dari agama Islam harus ditolak. Masyarakat desa Borangan kecamatan

⁹⁶ HR. Ahmad, I: 131.

Manisrenggo kabupaten Klaten harus menolak perijodohan yang dilakukan oleh orang tua dengan orang yang tidak seagama atau orang yang akan menyebabkan ia keluar dari agama Islam. Tidak ada ketaatan terhadap orang tua dalam hal-hal yang keluar dari ajaran agama Islam.

2. Faktor kemudahan administrasi perkawinan

Faktor kemudahan administrasi perkawinan menjadi salah satu sebab orang menundukkan agama dalam perkawinan yang semula beda agama di desa Borongan kecamatan Manisrenggo kabupaten Klaten. Faktor ini jelas merupakan permainan yang dibuat oleh orang yang ingin memudahkan administrasi perkawinan. Mereka mencari celah hukum (*hillatul hukmi*) agar tercapai tujuan mereka, yaitu menikah dengan pujaan hatinya meski berbeda keyakinan agamanya. Dengan jalan ini, maka mereka terhindar dari sangsi hukum. Namun mereka lupa akan ajaran agama yang tidak membolehkan manusia untuk

keluar dari agama (murtad), atau bahkan mempermainkan agamanya.

3. Faktor ketidak tahuan ajaran agama.

Faktor ketiga dari penundukan hukum dalam perkawinan yang semula beda agama di desa Borangan kecamatan Manisrenggo kabupaten Klaten adalah faktor ketidak tahuan ajaran agama. Faktor ini terkadang berkaitan dengan faktor kedua, yaitu faktor untuk kemudahan administrasi perkawinan.

Orang-orang yang tidak paham ajaran agamanya maka ia tidak termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT. Sebab, kebaikan didunia adalah ilmu dan amal shalih, sedangkan kebaikan di akhirat adalah Iman dan Islam dengan mendapat surga.

Pada masa sekarang, dengan informasi yang luas dan aturan yang jelas dalam perkawinan, maka sebetulnya faktor ketidak tahuan ajaran agama tidak relevan dan hanya mengada-ada agar terhindar dari sanksi hukum. Agama

dijadikan alat mainan dalam administrasi perkawinan, sebab orang dengan mudah menggonta-ganti agama. Aturan perkawinan dalam agama Islam di Indonesia yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas bahwa menikah hanya boleh dengan orang yang seagama, bukan kepada orang yang berlainan agama, bukan pula kepada orang yang mempermainkan agama (menggonta-ganti agama).

Faktor ketidak tahuan ajaran agama termasuk faktor yang dibuat oleh masyarakat agar mereka seakan-akan tidak tahu aturan agama. Jika hal demikian benar, maka mereka termasuk orang-orang yang berpaling dari Allah. Firman Allah SWT dalam Surat Thaha ayat 124-126:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي
أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى.

Artinya: *Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh ia akan menjalani*

kehidupan yang sempit dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata: Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Dia (Allah) berfirman: Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, dan kamu mengabaikannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamu diabaikan.⁹⁷

Semua faktor-faktor di atas merupakan jalan untuk melegalkan perkawinan mereka supaya di akui oleh hukum yang ada di Indonesia.⁹⁸ Namun semua faktor di atas akan jelas berhubungan dengan larangan agama untuk keluar darinya atau disebut dengan murtad.

Murtad adalah memutus Islam dengan niat atau perkataan atau dengan perbuatan, baik dengan mengatakan hal tersebut karena mengolok-olok, atau karena ngeyel atau karena keyakinannya.⁹⁹ Murtad dalam artian yang mudah adalah seseorang yang keluar dari agama Islam.

⁹⁷ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 320-321.

⁹⁸ Wawancara dengan tokoh agama Islam Desa Borangan, Ustadz Siswoyo, di rumahnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 pukul 17.15 WIB.

⁹⁹ Minhaj al-thalibin: 293.

Murtad atau keluar dari agama Islam adalah tidak boleh, karena orang yang murtad termasuk orang-orang yang sesat, dan orang yang mati dalam keadaan tidak beriman (kafir), maka baginya azab yang pedih dan tidak ada yang menolong atau memberinya syafaat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ali Imran (3) ayat 90-91.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ نُّقْبِلَ
تَوْبَتَهُمْ. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا
وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا
وَلَوْ أَفْتَدَى بِهِ. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَالَهُمْ مَنْ
تَأْصِرِينَ.

Artinya: *Sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya, dan merekalah orang-orang yang sesat. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafirannya, tidak akan diterima (tebusan) dari seseorang di antara mereka sekalipun (berupa) emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang*

yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong.¹⁰⁰

Q.S. Al-Baqarah ayat 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
وَصَدُّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ
الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ
إِنْ أَسْتَطَعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ
كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan, mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar)

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 61.

dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Bahkan, jika dilihat dari dalil-dalil hadis, maka orang yang melakukan tindakan keluar dari agama Islam (murtad) boleh dibunuh (halal darahnya).

عن ابى عباس رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ" (رواه البخارى)

Artinya: *Dari Abdullah Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah.”*¹⁰¹

Menurut penulis, cara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Borangan dengan masuk Islam karena alasan perkawinan (menundukan hukum) atau mengganti agama dalam perkawinan tidaklah menjadi perbuatan yang baik, baik dari sisi ajaran agama, ajaran budaya (penilaian terhadap konsep *bobot*), maupun dari tata aturan perkawinan di Indonesia.

¹⁰¹ Imam Ashon’any, *Subulus Salam*, Juz III, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, hlm. 265.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, setelah penulis mempelajari data-data, melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir penulisan skripsi ini, penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten adalah dengan cara masuk Islam atau menundukkan hukum dengan berpindah agama kepada salah satu agama calon pasangannya. Praktik perkawinan seperti ini menurut Islam adalah *fasakh* karena murtad (setelah masuk Islam kemudian kembali lagi ke agamanya semula (non muslim) halal darahnya untuk dibunuh).

2. Faktor-faktor yang melatar belakangi masuk Islam (penundukan hukum) karena alasan perkawinan dengan cara berpindah agama sementara dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama ini di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten ada tiga, yaitu: *Pertama*, faktor ketaatan kepada orang tua (perjodohan), bahwa anak harus taat kepada orang tua ketika orang tua itu menjodohkan anaknya dengan orang yang kuat agamanya, akan tetapi jika orang tua menjodohkan anaknya dengan orang lain yang lemah agamanya, maka anak tidak harus taat kepada orang tua. *Kedua*, Faktor kemudahan administrasi perkawinan, KUA sebagai lembaga perkawinan sebaiknya harus bisa menyeleksi dan mengantisipasi terjadinya perpindahan agama (masuk Islam) karena alasan perkawinan. *Ketiga*, faktor ketidak tahuan (ketidak mau tahuan) ajaran agama, tokoh agama sebaiknya harus memberikan solusi terhadap hukum perkawinan yang semula beda agama.

B. Saran-saran

Melihat *realita* yang terjadi di zaman sekarang, praktik perkawinan beda agama masih terjadi sampai sekarang, seperti di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, maka hendaknya pihak Balai Desa Borangan dan KUA Kecamatan Manisrenggo, tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan pencerahan, pengarahan dan solusi kepada masyarakat Desa Borangan khususnya (terutama remaja-remaja Desa Borangan) tentang perkawinan beda agama menurut Hukum Islam maupun Hukum di Indonesia.

Seyogyanya para remaja sebelum menikah berhati-hati dalam memilih jodoh, sebagaimana yang dipesankan oleh Hadits diatas. Dan kepada pejabat KUA dimohon bisa menyeleksi dan mengantisipasi dengan cermat perihal tersebut di Desa Borangan khususnya, sehingga tidak ada lagi pernikahan dengan melakukan penundukan hukum (berpindah agama sementara). Karena kalau setelah nikah kemudian meninggalkan agama Islam dan kembali ke agama semula, maka menurut Islam adalah murtad, yang

menurut hadits di atas halal darahnya. Dan murtad itu mencelakakan orang yang bersangkutan di akhirat kelak.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada *Illahi Robbi* yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis haturkan terima kasih.

Kiranya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan rendah hati penulis berharap ada saran dan kritik yang membangun dari semua pihak khususnya para pembaca yang budiman untuk perbaikan selanjutnya. Hanya kepada Allah penulis bergantung dan memohon agar karya yang sederhana ini ada manfaatnya.

Amin Yaa Robbal 'Alamiin....

DAFTAR PUSTAKA

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Agama RI, Departemen, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat, 1999.

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, , cet. VII, 1984.

Ali As-Shobuni, Muhammad, *Rawa' iul Bayan*, Juz I.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. I, 2013.

Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: TERAS, cet. I, 2009.

Ali As-Sayis, Syekh Muhammad, *Tafsir Ayatil Qur'an*, Juz I.

Ash-Shon'ani, Imam, *Subulus Salam*, juz III, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd.

Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media.

Sabiq, Sayid, *Fiqhus Sunnah*, juz I.

S. Meliala, Djaja, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nusa Aulia, cet. I, 2015.

Ash-Shon'ani, Imam, *Subulus Salam*, juz III, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd.

Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. I, 2009.

Narbuko, Cholid & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. X, 2009.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, cet. I, 1992.

Suyanto, Bagong & Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cet. VII, 2013.

Khatib Syarbiny, Syekh Muhammad, *Mughnil Muhtaj*, Juz III.

Muhammad Syaukani, Muhammad bin Ali bin, *Nailul Author*, Juz VI, Dar al-Fikr.

Zakariya Al-Anshary, Abu Yahya, *Fath Al-Wahhab*, Juz II.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. VI, 2006.

Safioedin, Asis, *Beberapa hal tentang Burgerlijke Wetboek*, Bandung: Alumni, cet. V, 1986.

Saleh, Wantjik, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, cet. II, 1974.

Kamus Umum Bahasa Indonesia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yogyakarta: New Merah Putih, 2012.

Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2011.

http://www.kompasiana.com/tikasinaga/menyiasati-hukum-dalam-perkawinan-beda-agama_55287dab6ea834b4638b4582 di akses pada tanggal 02 April 2015 pada pukul 10.00 WIB.

<http://www.voa-islam.com/news/undercover/2013/03/12/23564/ustadz-ahmad-yani-tidak-sah-menikah-beda-agama>. di akses pada tanggal 02 April 2015 pada pukul 10.00 WIB

<http://asnawiihsan.blogspot.com/2009/05/perkawinan-beda-agama.html>.

<http://kuapraci.blogspot.com/2011/10/makalah-khairil-anwar-perkawinan-beda.html> di akses pada tanggal 02 April 2015 pada pukul 10.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama> di akses pada tanggal 02 April 2015 pada pukul 10.00 WIB.

http://www.kompasiana.com/tikasinaga/menyiasati-hukum-dalam-perkawinan-beda-agama_55287dab6ea834b4638b4582 di akses pada tanggal 02 April 2015 pada pukul 10.00 WIB.

Widyaningrum, Rosyidah, 042111103, *Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011.

Mansyur, M. Syukron, 05350028, *Suami Beda Agama dan Pengaruhnya Terhadap Relasi Dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum,*

Kabupaten Klaten), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Nikmah, Ulfatin, 05350057, *Keluarga Harmonis Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Wawancara dengan Direktur LPKBHI Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, ibu Anthin Lathifah, M. Ag, pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 pukul 13.30 WIB di Kantor LPKBHI Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

Wawancara dengan Praktisi Hukum & Akademisi UIN Walisomgo Semarang, bapak Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag, pada hari selasa 03 Nopember 2015 pukul 11.30 WIB di Kantor Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

Wawancara dengan Praktisi Hukum & Akademisi UIN Walisongo Semarang, bapak Drs. H. Eman Sulaiman, M.H, pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 pukul 10.15 WIB di Kantor Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

Data kependudukan Desa Borangan Tahun 2014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Atabik Hasin
Tempat, tanggal lahir : Demak, 04 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Suburan Barat No. 171 Rt.05/II
Mranggen

Pendidikan :

1. TK Futuhiyyah Mranggen Demak, Lulus Tahun 1999.
2. MI Futuhiyyah Mranggen Demak, Lulus Tahun 2005.
3. MTs Futuhiyyah-1Mranggen Demak, Lulus Tahun 2008.
4. MAPK – MAN 1 Surakarta, Lulus Tahun 2011.

Organisasi :

1. Rebana MI Futuhiyyah
2. OSIS MTs Futuhiyyah-1
3. OPPK MAPK – MAN 1 Surakarta
4. PMII Rayon Syari'ah
5. HMJ Ahwal Al-Syakhsiyyah

Semarang, 22 November 2015

Atabik Hasin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : ATABIK HASIN

NIM : 112111017

Fakultas : Syari'ah

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....80..... (.....4,0 /A.....)

Semarang, 12 Juni 2015



Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. MANISRENGGO
Alamat : Tanjungsari, Manisrenggo, Klaten 57485

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kk.11.10.18 / HM.00 / 136 / 2015

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Menerangkan
dengan sebenarnya bahwa nama mahasiswa UIN Walisongo tersebut dibawah ini :

Nama : Atabik Hasin

NIM : 112111017

Fak/Jurusan : Syari'ah / Ahwal Al Syaksiyah

Benar-benar telah melaksanakan penelitian /Riset di KUA Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten
pada hari Rabu Tanggal 01 april 2015 , untuk keperluan penyusunan tugas akhir/skripsi dengan judul:

“ Faktor-Faktor Penundukan hukum Dalam Perkawinan Pasangan Beda Agama (*Studi Di Desa
Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten*)

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manisrenggo, 01 April 2015

Kepala



Muhammad Ashonany, S.Ag
NIP. 19750421200501 1 003